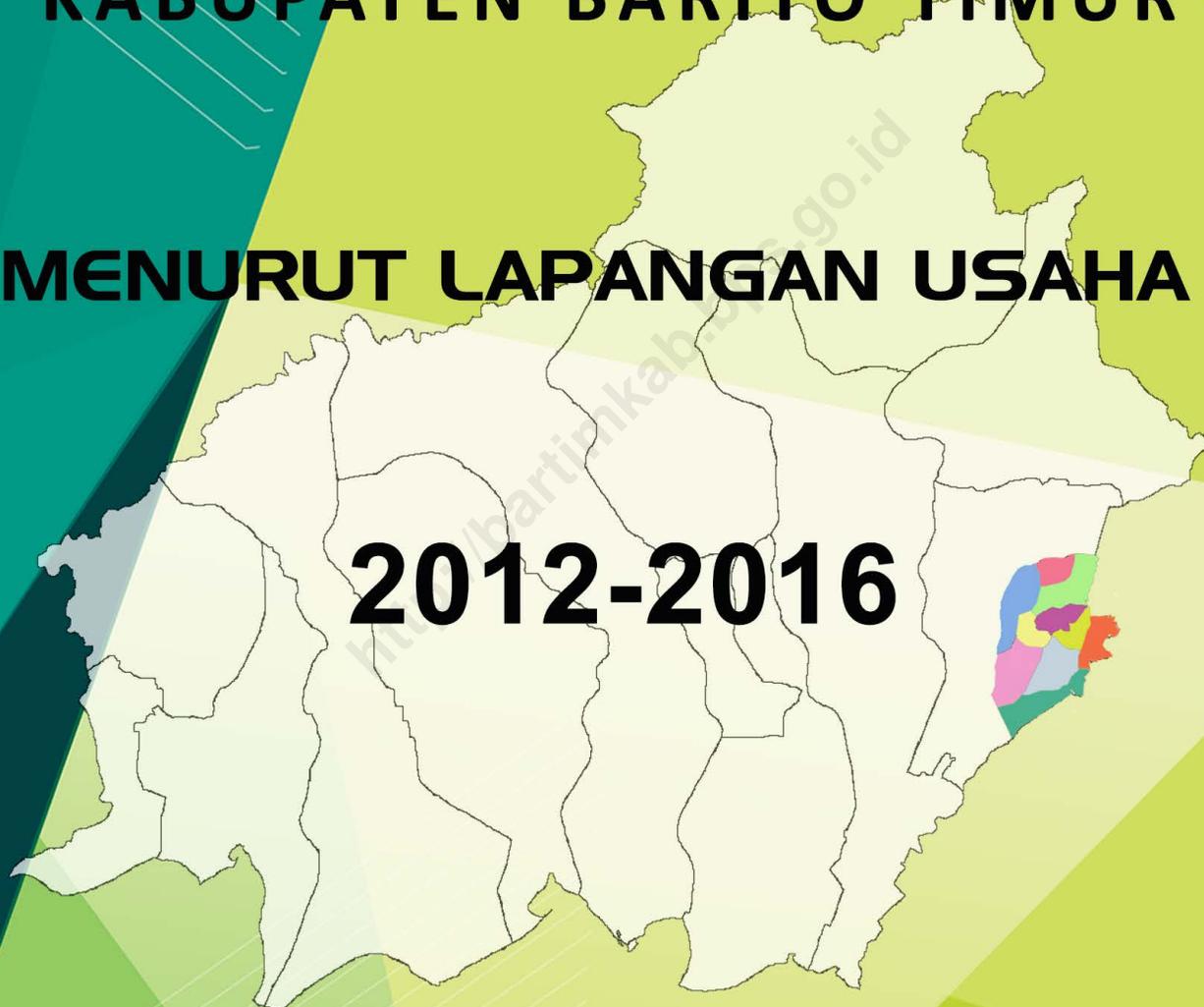


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN BARITO TIMUR

MENURUT LAPANGAN USAHA

2012-2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN BARITO TIMUR

MENURUT LAPANGAN USAHA

2012-2016

A white outline map of Kabupaten Barito Timur is centered on the page. The map shows the district's irregular border and is divided into several smaller sub-district or village-level boundaries. The map is overlaid with a faint watermark that reads 'http://bartimkab.go.id'. The background of the entire page consists of various shades of gray and black geometric shapes, including triangles and lines, creating a modern, abstract design.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BARITO TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA 2012–2016

ISSN : 0126-4797

Katalog : 9302008.6212

Nomor Publikasi : 62120.1702

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xvi + 95 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur

Tata Letak :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur

Infografis :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur

Dicetak dan Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	: Agust Bernaldus
Penyusun	: Zuhaifah
Tata Letak	: Zuhaifah
Penyunting	: Syifa Aghnia Rahma
Gambar Kulit	: Kartika Yunitaningtyas
Infografis	: Moch. Mifthachul Mubbarak

<http://bartimkab.bps.go.id>

Dalam Era Otonomi Daerah, penyusunan suatu perencanaan pembangunan dibutuhkan berbagai data serta informasi berbasis statistik yang digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan arah dan sasaran kebijakan. Untuk itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur berupaya menyusun data statistik yang disajikan dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha.

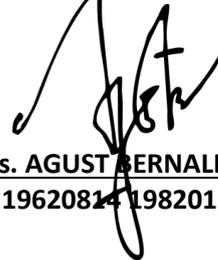
Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012–2016 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Barito Timur secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2012–2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan dalam bentuk nominal dan persentase. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang sudah direkomendasikan oleh *United Nations*.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungannya sehingga kami dapat menerbitkan buku ini tepat waktu. Namun kami sadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan publikasi ini, oleh karena itu kami mengharap adanya saran dan masukan yang membangun dari pemakai data untuk perbaikan di waktu yang akan datang.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Tamiang Layang, 10 Agustus 2017

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR**



Drs. AGUST BERNALDUS
NIP. 19620814198201 1 001

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	lx
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PENJELASAN TEKNIS	xv
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	3
1.2 Metode Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto	4
1.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	6
1.4 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	6
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	11
2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Penggalian	13
2.2 Pertambangan dan Penggalian	18
2.3 Industri Pengolahan	20
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas	25
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	26
2.6 Konstruksi	27
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28
2.8 Transportasi dan Pergudangan	30
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33
2.10 Informasi dan Komunikasi	35
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	37
2.12 Real Estate	44
2.13 Jasa Perusahaan	44
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	46
2.15 Jasa Pendidikan	47
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47
2.17 Jasa Lainnya	48

III. TINJAUAN EKONOMI BARITO TIMUR	51
3.1 Struktur Ekonomi	53
3.2 Pertumbuhan Ekonomi	55
3.3 PDRB Perkapita	58
3.4 Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	59
IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	61
4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	63
4.2 Pertambangan dan Penggalian	65
4.3 Industri Pengolahan	66
4.4 Pengadaan Listrik dan Gas	67
4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	69
4.6 Konstruksi	70
4.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71
4.8 Transportasi dan Pergudangan	72
4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73
4.10 Informasi dan Komunikasi	75
4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	76
4.12 <i>Real Estate</i>	78
4.13 Jasa Perusahaan	79
4.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	80
4.15 Jasa Pendidikan	81
4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82
4.17 Jasa Lainnya	83

		Halaman
Gambar 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Timur Tahun 2012–2016 (Milyar Rupiah)	53
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	55
Gambar 3.3	PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012–2016	59
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2016 (Persen)	60
Gambar 4.1	Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	64
Gambar 4.2	Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	66
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	67
Gambar 4.4	Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	68
Gambar 4.5	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	69
Gambar 4.6	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Konstruksi Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	70
Gambar 4.7	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	71
Gambar 4.8	Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	73
Gambar 4.9	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	74
Gambar 4.10	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan makan Minum Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	75
Gambar 4.11	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	76
Gambar 4.12	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2012–2016	78
Gambar 4.13	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori <i>Real Estate</i> Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	79
Gambar 4.14	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Jasa Perusahaan Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	80

Gambar 4.15	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Administrasi Pemerintahan Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	81
Gambar 4.16	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Jasa Pendidikan Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	82
Gambar 4.17	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Kesehatan dan Kegiatan Sosial Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	83
Gambar 4.18	Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Jasa Lainnya Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016	84

<http://bartimkab.bps.go.id>

		Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	9
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	10
Tabel 3.1	Peranan PDRB Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016	54
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016	56
Tabel 3.3	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Persen)	57
Tabel 3.4	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012–2016 (Persen)	60
Tabel 4.1	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian (Persen), 2012–2016	63
Tabel 4.2	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2012–2016	65
Tabel 4.3	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2012–2016	68
Tabel 4.4	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2012–2016	72
Tabel 4.5	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2012–2016	77

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012–2016	87
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012–2016	88
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016	89
Lampiran 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016	90
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016	91
Lampiran 6	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016	92
Lampiran 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016	93
Lampiran 8	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016	94
Lampiran 9	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016	95

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Perhitungan PDRB di Indonesia hingga saat ini baru disusun dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sementara dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun

ke $n-1$, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

6. **Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
7. **Harga Konstan** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
8. **Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

<http://bartimkab.bps.go.id>

BAB 1

PENJELASAN UMUM



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen ataupun non-residen.



1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, dan meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Metode Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto

1.2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

a. Metode Langsung

Metode Langsung adalah melakukan penghitungan PDRB yang didasarkan kepada data yang tersedia di lapangan secara rutin. Metode ini melalui tiga pendekatan, yaitu:

- ❖ Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- ❖ Pendekatan Pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- ❖ Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta tidak mencari untung yang melayani rumahtangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto, disuatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

b. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Penghitungan nilai tambah bruto suatu kegiatan ekonomi/sector dengan metode tidak langsung adalah dengan mengalokasikan nilai tambah bruto Provinsi ke masing-masing kegiatan ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Sebagai alokatornya digunakan indikator yang paling relevan atau erat kaitannya dengan kegiatan sektor tersebut.

1.2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Pada dasarnya dikenal empat cara penghitungan nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar. Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan, diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara dari hasil perhitungan di atas.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara, karena itu biasanya diperoleh dari hasil perkalian output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara.

b. Ekstrapolasi

Dilakukan dengan cara memperbaharui (*updating*) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya.

c. Deflasi

Dilakukan dengan membagi nilai masing-masing tahun dengan relatif harga yang sesuai ($\text{indeks harga} \times 1/100$). Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar dan sebagainya. Indeks harga diatas dapat pula dipakai sebagai inflator, dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

d. Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini, yang dideflate adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang dipergunakan sebagai deflator biasanya Indeks Harga Produsen atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input tersebut.

Kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam perhitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

1.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.4 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi maupun Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi, dan akumulasi harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur, dan pertumbuhan ekonomi;
- Menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)*:**
Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- **Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)***
- **Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).**

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi :**

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

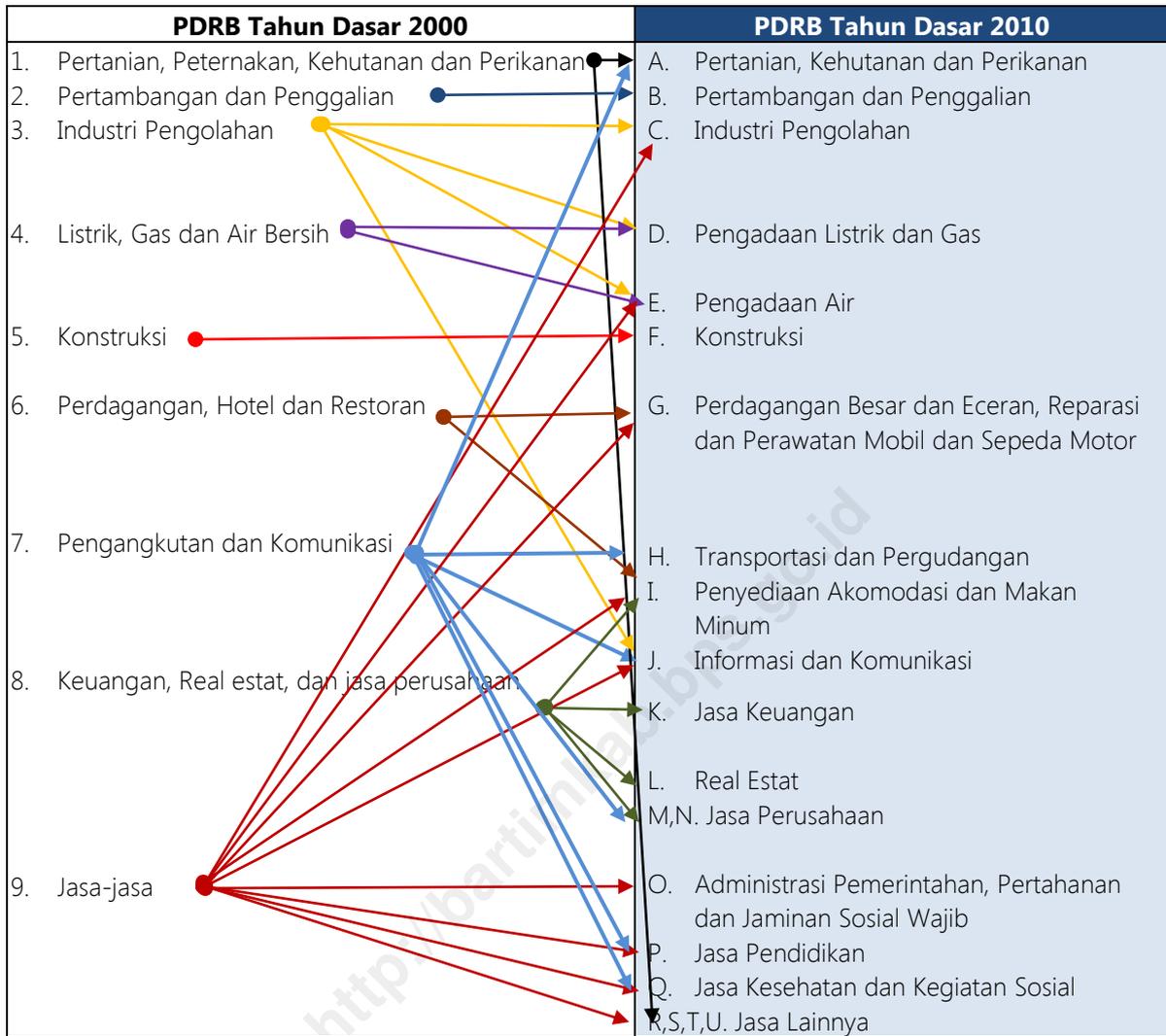
Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge (IBSC)</i> .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)</i>
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



BAB 2

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya



Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian, dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari bidang Statistik Produksi BPS Provinsi. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS Republik Indonesia (RI), dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Sementara data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS RI.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari bidang Statistik Produksi BPS Provinsi. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI, dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sementara data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta survei khusus BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI, dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sementara data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten, serta survei khusus BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI, dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sementara data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS RI.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sementara kegiatan

penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat maupun satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS RI. Sementara proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten, serta survei khusus BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS RI. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI. Sementara data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Perikanan Provinsi maupun Kabupaten. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI, dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sementara data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditas pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditas lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sementara untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP, ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditas yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (migas); Pertambangan Batubara dan Lignit; Pertambangan Bijih Logam; serta Pertambangan dan Penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan Migas dan Panas Bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak, produksi gas alam, serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sementara NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan, data struktur biaya diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah maupun bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, pencampuran, serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada Subkategori Pertambangan Migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Statistik Pertambangan Non Migas–BPS, data dari bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi maupun Kabupaten, serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi maupun Kabupaten.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt, dan termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produk pertambangan bijih logam antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi, peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain, serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak, dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditas penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditas garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian diperoleh dari Dinas Pertambangan dan

Energi Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, hasil survei khusus perusahaan penggalian, dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, maupun komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi, dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane, dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit, dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, *snuff*, *chewing*, dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (*snuff*), rokok kretek, rokok putih, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12.

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan, dan penyelesaian tekstil bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spreng, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris. Tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa maupun pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan, serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan, dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan

mebeuler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, serta Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Percetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia serta Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam,

pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, serta pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak, serta vpotongan atau bongkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi, dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik maupun yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga serta komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau

bergerak, tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, bangunan, pertanian, dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28.

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup industri kendaraan bermotor dan *semi trailer* serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara, dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan *trailer* atau *semi-trailer*. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan *mebeuler* dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen, dan keramik. Pengolahan pembuatan *mebeuler* adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan, dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika maupun kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan *mebeuler* cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Akan tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan, dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data produksi/indikator produksi kategori Industri Pengolahan diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS RI, Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten, serta survei khusus BPS. Sementara indikator harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS TI. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei

Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK BPS ditambah dengan berbagai survei khusus yang dilakukan DNP.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin, produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas, serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol, menyalurkan tenaga listrik atau gas, serta pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman, dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara(PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN). Seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, serta listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sementara output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar, sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin, dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, serta kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian, penyediaan semua jenis bahan bakar gas, dan penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin, dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman, dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sementara output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga maupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sementara output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber data produksi bersumber dari PDAM Kabupaten, Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi, APBD Kabupaten, Dinas Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten, serta survei khusus BPS. Sementara untuk data harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI, data struktur biaya diperoleh dari hasil survei tahunan air bersih BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan, perubahan, serta pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel, jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi, bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; instalasi gedung dan bangunan sipil; instalasi listrik termasuk alat pendingin dan

pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah, serta saluran drainase dan sejenisnya; pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, dan bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi bersumber dari Bidang Statistik Produksi Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, serta survei-survei BPS Kabupaten. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS RI. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS RI.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar, pengepakan ulang menjadi ukuran

yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, serta pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sementara pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk pula perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda

motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS), dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS Kabupaten.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara, dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sementara jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota, dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sementara data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS RI. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi, serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkut). Sementara output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bus, dan truk) diperoleh dari Kantor SAMSAT Kabupaten. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sementara data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha. Kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sementara NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sementara indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia

(PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS RI. Kemudian penghitungan rasio NTB menggunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal feri.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang serta barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi. Ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang serta barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang, dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan serta survei-survei BPS. Sementara indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang, dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Feri, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS RI. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dengan ekstrapolatornya adalah indeks

produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sementara NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines, serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, seperti jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir); jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut; keagenan penumpang; jasa ekspedisi; jalan tol; pergudangan; jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut; serta jasa penunjang lainnya seperti pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN serta beberapa perusahaan *go public*. Sementara output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar harga berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Reksa, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk

penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya berupa fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman serta fasilitas rekreasi. Penyediaan akomodasi yang termasuk jangka pendek, antara lain hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sementara NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata BPS RI. Kemudian indikator harga menggunakan data tarif dari survei hotel tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata BPS RI.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* maupun *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator

harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sementara output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi Subkategori Penyediaan Makan dan Minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 BPS. Data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data, serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori ini terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, serta konsultasi komputer dan teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, serta termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti *cd rom* buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara, dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, *video tape* atau *disk* untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti *editing*, *cutting*, *dubbing* film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain, serta pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan, mendistribusikannya, dan menerbitkan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya,

seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan, dan sejenisnya. Termasuk pula penyiaran data yang khususnya terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi, dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak, perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi, manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public yang* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi. Sementara NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dimana NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS RI, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan perfilman, dan Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf. Sementara untuk kegiatan telekomunikasi, sumber data diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata, PT. Bakrie Telecom, dan PT. Smartfren Telecom. Indikator harga berupa indeks harga seperti IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI, sementara IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya, serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, serta memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah maupun panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok jasa perantara keuangan, sedangkan memberikan jasa lainnya hanya yang kegiatan pendukung seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, *mendiskonto* surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil, dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya. Seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, serta pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung seperti mengirim uang membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sementara output KSP, BMT, dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa, dan reasuransi baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sementara IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Kemudian untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Kemudian IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan *leasing* lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi

pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Kemudian IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manajer investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, serta kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Kemudian data IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI

Manajer Investasi

Manajer investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manajer investasi. Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manajer investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Kemudian untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Kemudian data IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Kemudian IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan

wali amanat. Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Kemudian IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Kemudian untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Kemudian untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan, atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak, dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sementara output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sementara data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ) BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi; jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya.

Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan *drafting*, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sementara output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI. Kemudian untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk Kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada Kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi, dimana indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan, Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS RI, Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah, Jumlah pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan maupun tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini selain mencakup pendidikan negeri dan swasta, juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan, serta penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan melalui penyiaran radio dan televisi, internet, dan surat kabar. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan lain. Tercakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, Sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data yang digunakan diperoleh dari Realisasi APBN/APBD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS RI, serta Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan hingga yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: jasa rumah sakit, jasa klinik, jasa rumah sakit Lainnya, praktek dokter, jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedic, jasa pelayanan kesehatan tradisional, jasa pelayanan penunjang

kesehatan, jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*), jasa kesehatan hewan, serta jasa kegiatan sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD, Kementerian Kesehatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI; dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen RI.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 (empat) kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode

deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sementara untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil survei *intern* BPS (SKTIR).

Sementara output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), serta survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk *The Internasional Moneter Fund*, *The World Bank*, *The World Health Organization (WHO)*, *the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, dan lain-lain.

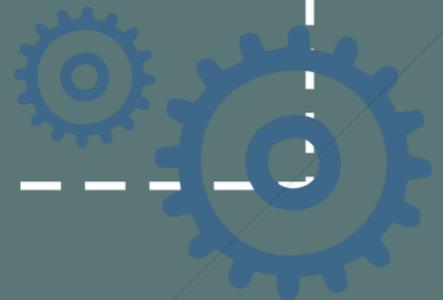
Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.



LAMPIRAN

<http://bakamkab.bps.go.id>



BAB 3 TINJAUAN EKONOMI KAB. BARITO TIMUR

PDRB BARTIM 2016

(Milyar Rupiah)

5.666,2

ADHB

4.510,4

ADHK



PDRB
per
KAPITA

Rp

48,5 Juta

7,66
%



Tumbuh

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Kab. Barito Timur sebesar 5,50 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (5,15%)

5,50
%

3 KATEGORI
YANG MENDOMINASI
STRUKTUR
PEREKONOMIAN
KABUPATEN
BARITO TIMUR

38,01
%

PERTAMBANGAN
DAN
PENGGAJIAN

18,90
%

PERTANIAN, KEHUTANAN
DAN PERIKANAN

7,85
%

KONSTRUKSI

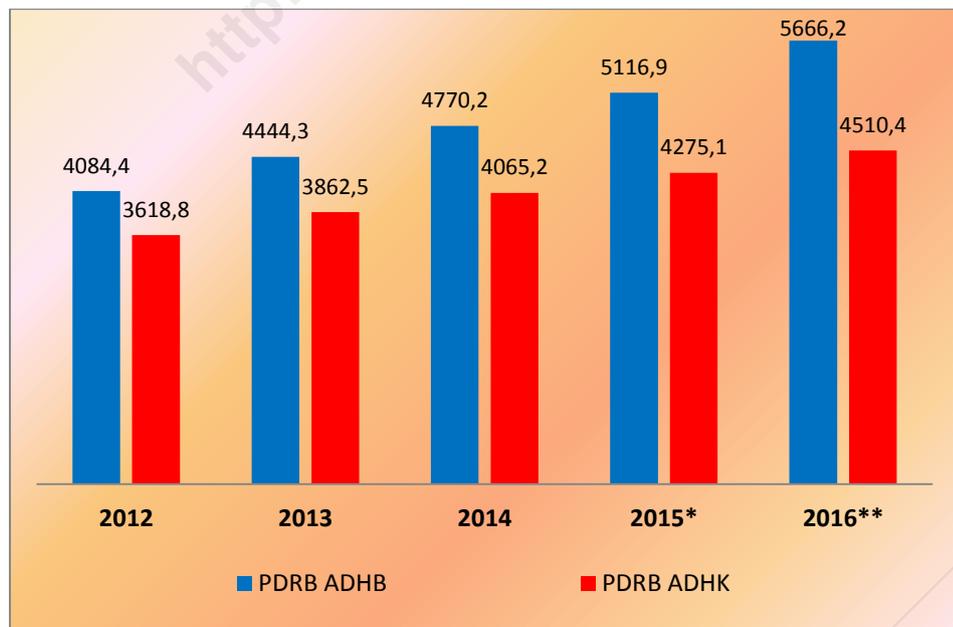
3.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menggambarkan berapa besar peran masing-masing lapangan usaha pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam perekonomian suatu daerah. Struktur ekonomi daerah dapat dijadikan sebagai dasar analisis maupun pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan perekonomian. Struktur ekonomi ini dapat dilihat dari besarnya distribusi persentase nilai tambah masing-masing kategori terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu daerah, maka akan terjadi pula perubahan peranan setiap kategori yang berakibat pada bergesernya struktur ekonomi daerah tersebut. Daerah yang memiliki sumber daya alam potensial akan menggali dan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang dimiliki, sedangkan bagi daerah yang tidak dapat mengandalkan sumber daya alamnya maka akan menggali dan memacu keunggulan sumber daya lainnya.

PDRB Barito Timur atas dasar harga berlaku tahun 2016 mencapai 5.666,2 miliar rupiah. Ini merupakan total Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dibentuk oleh seluruh lapangan usaha di Barito Timur. Sementara PDRB yang dinilai dengan harga konstan tahun 2010 mencapai 4.510,4 miliar rupiah.

Gambar 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Timur Tahun 2012–2016 (Miliar Rupiah)



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Struktur perekonomian Barito Timur didominasi oleh tiga kategori, yaitu Kategori Pertambangan dan Penggalian; Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Kategori Konstruksi. Ketiga kategori ini memberikan kontribusi sebesar 64,76 persen dalam pembentukan PDRB Barito Timur tahun 2016. Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian merupakan yang terbesar yakni 38,01 persen; kemudian diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,90 persen); dan Konstruksi (7,85 persen). Sementara 14 kategori lainnya berkontribusi di bawah 7 persen terhadap total PDRB Barito Timur.

Besarnya sumbangan Kategori Pertambangan dan Penggalian serta Kategori Pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Barito Timur menunjukkan bahwa perekonomian Barito Timur masih bergantung pada sumber daya alam (*resource base*). Namun demikian jika dilihat *tren* dari besarnya kontribusi kedua kategori tersebut selama periode 2012–2016, terdapat kecenderungan yang menurun.

Tabel 3.1 Peranan PDRB Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,75	19,97	19,74	19,75	18,90
B	Pertambangan dan Penggalian	45,20	45,04	42,93	39,44	38,01
C	Industri Pengolahan	5,50	5,54	6,04	6,58	6,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	5,52	5,94	6,53	7,32	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,24	5,33	5,87	6,46	6,80
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42	3,62	3,96	4,28	4,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04	1,10	1,19	1,30	1,38
J	Informasi dan Komunikasi	0,95	0,97	1,00	1,07	1,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	1,08	1,11	1,18	1,22
L	Real Estat	2,00	2,02	2,13	2,22	2,27
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,45	3,49	3,52	3,74	3,88
P	Jasa Pendidikan	3,99	3,98	3,95	4,41	4,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,29	1,37	1,52	1,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,48	0,49	0,51	0,57	0,58
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

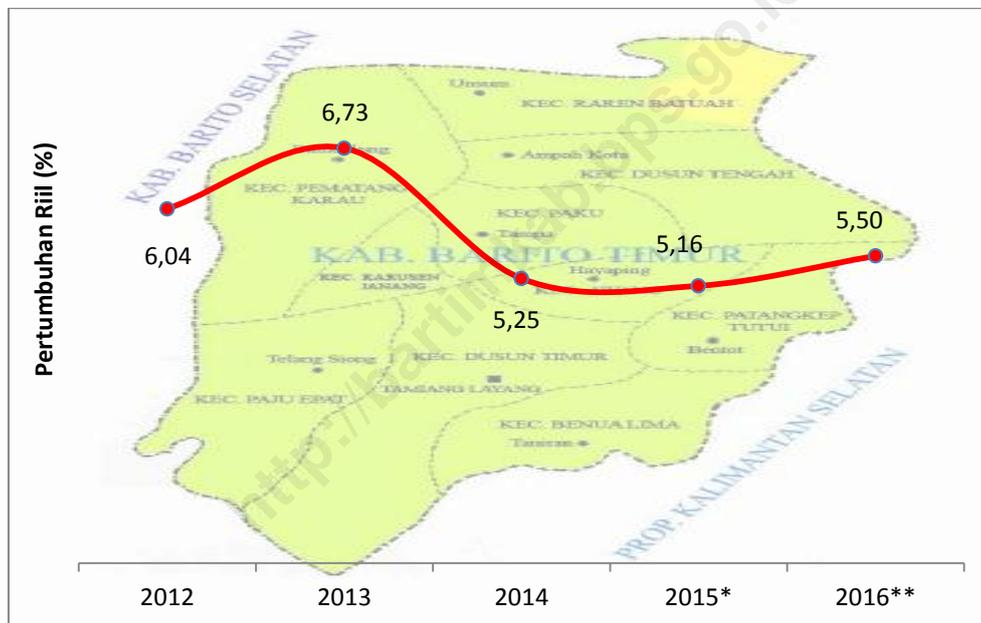
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2016 adalah sebesar 5,50 persen atau mengalami percepatan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 5,16 persen. Bila dicermati lebih lanjut, laju pertumbuhan riil Barito Timur sepanjang tahun 2012–2016 selalu bernilai positif. Laju pertumbuhan yang positif ini menunjukkan adanya peningkatan kegiatan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa setiap tahunnya.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,89	2,83	1,35	6,04	3,90
B	Pertambangan dan Penggalian	7,66	8,63	5,43	1,14	3,45
C	Industri Pengolahan	6,33	5,65	8,38	9,69	9,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,51	13,46	8,94	16,43	5,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,95	3,07	5,64	9,84	8,97
F	Konstruksi	9,07	11,98	10,08	12,37	8,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,67	6,87	7,93	10,81	8,94
H	Transportasi dan Pergudangan	9,41	7,48	8,33	8,21	9,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,58	7,14	8,87	9,57	9,08
J	Informasi dan Komunikasi	10,16	9,70	9,54	11,96	9,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,54	8,65	7,86	10,37	10,12
L	Real Estat	6,01	4,71	4,69	4,95	4,44
M,N	Jasa Perusahaan	8,92	8,01	4,48	5,89	5,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,26	2,91	2,90	8,13	6,69
P	Jasa Pendidikan	1,36	2,94	4,36	9,98	9,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,16	4,75	4,98	10,98	8,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,94	3,19	5,83	8,89	7,91
Produk Domestik Regional Bruto		6,04	6,73	5,25	5,16	5,50

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan lapangan usaha pembentuknya, terdapat 13 kategori yang memiliki laju pertumbuhan di atas total pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Timur pada tahun 2016. Kategori-kategori tersebut adalah Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (10,12 persen); Jasa Pendidikan (9,95 persen); Informasi dan komunikasi (9,83 persen); Industri Pengolahan (9,76 persen); Transportasi dan Pergudangan (9,46 persen); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,08 persen); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,98 persen); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (8,97 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,94 persen); Konstruksi (8,86 persen); Jasa Lainnya (7,91 persen); serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (6,69 persen). Sementara itu, untuk Kategori Jasa Perusahaan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan Penggalian memiliki laju pertumbuhan di bawah 5,50 persen.

Untuk melihat sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dilakukan perhitungan sumber pertumbuhan dengan memperhatikan laju distribusi dan laju pertumbuhan atas dasar harga konstan. Jika dirinci menurut lapangan usahanya, maka Kategori Pertambangan dan Penggalian berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur yaitu sebesar 1,48 persen dari total pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,50 persen di tahun 2016. Kategori lainnya yang memberikan andil cukup besar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,75 persen); Konstruksi (0,61 persen); dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,52 persen). Sementara untuk kategorinya lainnya hanya memberikan andil di bawah 0,50 persen.

Tabel 3.3 Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Persen)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,90	0,75
B Pertambangan dan Penggalian	3,45	1,48
C Industri Pengolahan	9,76	0,58
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,35	0,00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,97	0,00
F Konstruksi	8,86	0,61
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,94	0,52
H Transportasi dan Pergudangan	9,46	0,39
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,08	0,10
J Informasi dan Komunikasi	9,83	0,12
K Jasa Keuangan dan Asuransi	10,12	0,12
L Real Estat	4,44	0,08
M,N Jasa Perusahaan	5,43	0,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,69	0,22
P Jasa Pendidikan	9,95	0,41
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,98	0,13
R,S,T,U Jasa lainnya	7,91	0,04
Produk Domestik Regional Bruto	5,50	5,50

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

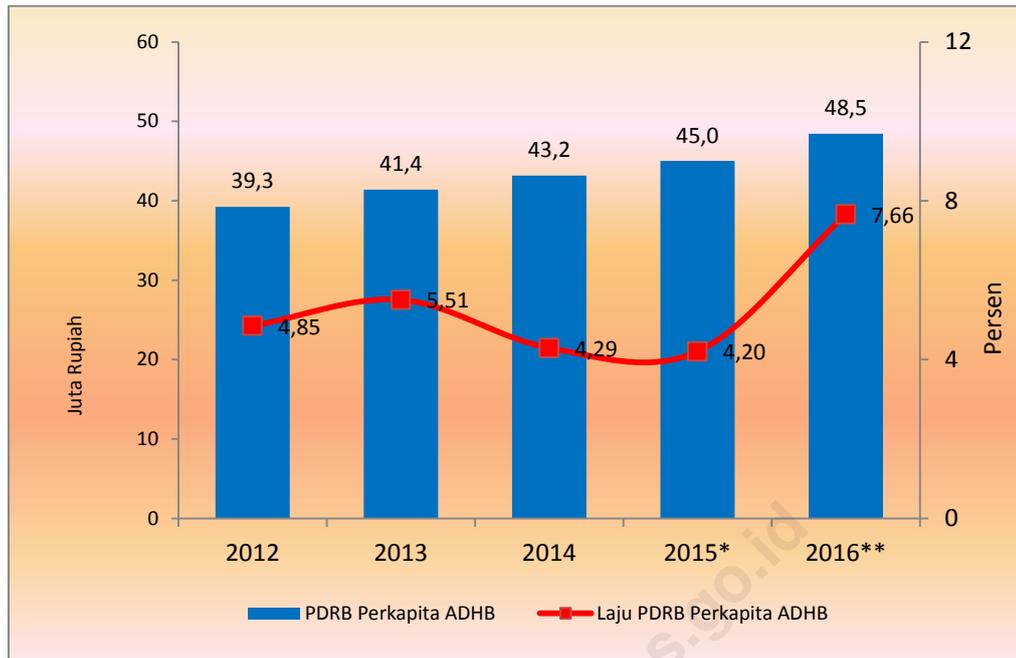
3.3 PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan akan tingginya tingkat kemakmuran bagi masyarakat, karena hal tersebut dipengaruhi juga oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Untuk melihat keberhasilan suatu pembangunan yang dilakukan melalui tahapan pembangunan selain dengan melihat angka PDRB, juga perlu memperhatikan perkembangan PDRB perkapita. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran dari segi pendapatan.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa PDRB perkapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Barito Timur (*Net Factor Income From Abroad*). Pendapatan perkapita yang disajikan belum sepenuhnya mampu menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sulitnya memperoleh data pendapatan yang keluar masuk Barito Timur tersebut, menyebabkan PDRB perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur kemampuan rata-rata pendapatan penduduk.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Barito Timur mencapai 48,5 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 7,66 persen. Laju pertumbuhan PDRB perkapita ini mengalami *tren* meningkat sepanjang tahun 2012–2016. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang selalu bernilai positif. Namun demikian besarnya nilai PDRB perkapita yang positif ini masih belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi, karena belum dikurangi dengan pendapatan yang keluar-masuk di Barito Timur. Oleh karena itu, perlu adanya kajian khusus mengenai hal tersebut.

Gambar 3.3 PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012–2016



* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.4 Perbandingan dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kalimantan Tengah

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur berdasarkan angka sangat sementara pada tahun 2016 berada di urutan ke-12 dengan nilai sebesar 5,50 persen. Angka tersebut masih berada di bawah angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 6,36 persen. Posisi laju pertumbuhan riil Barito Timur ini tepat berada di bawah Barito Selatan yang merupakan kabupaten tetangga dengan laju pertumbuhan 5,62 persen, dan di atas Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Seruyan dengan laju pertumbuhan 5,48 persen dan 5,02 persen.

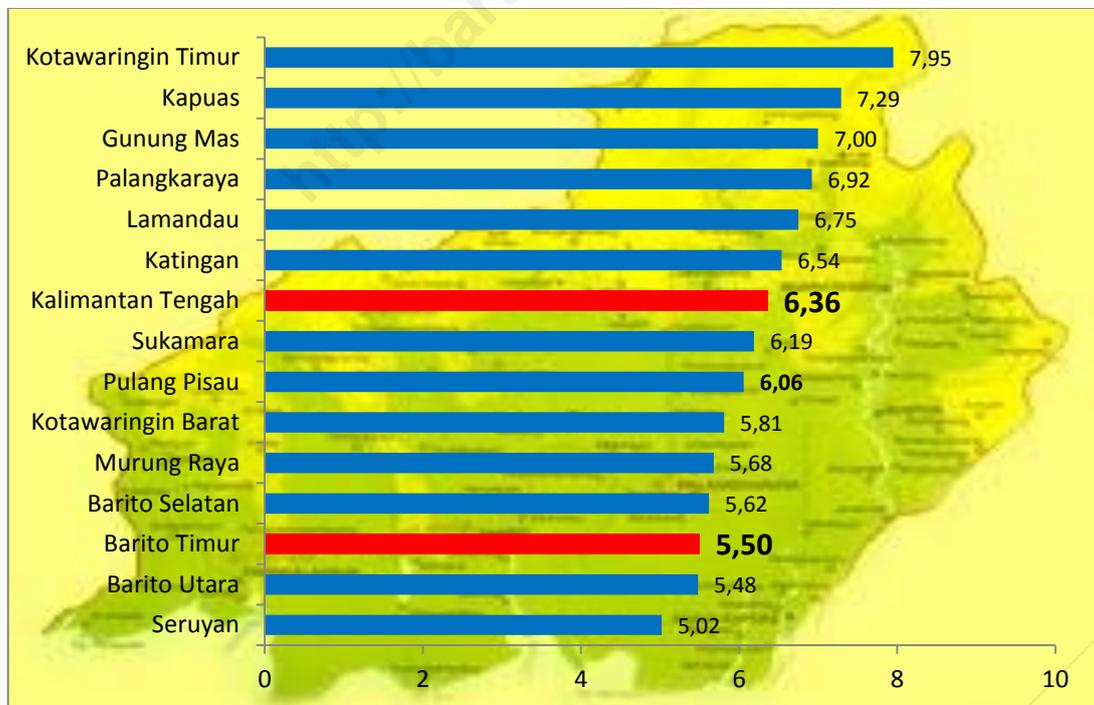
Tabel 3.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012–2016 (Persen)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kotawaringin Barat	6,70	6,99	6,90	7,32	5,81
2 Kotawaringin Timur	7,01	7,79	7,37	7,66	7,95
3 Kapuas	6,48	6,81	7,00	7,27	7,29
4 Barito Selatan	5,32	5,24	5,31	5,54	5,62
5 Barito Utara	6,23	7,04	4,20	5,29	5,48
6 Sukamara	6,28	6,44	6,05	6,00	6,19
7 Lamandau	6,97	7,00	6,98	6,76	6,75
8 Seruyan	5,16	6,28	5,31	5,17	5,02
9 Katingan	6,23	6,33	6,55	6,53	6,54
10 Pulang Pisau	6,46	6,79	7,23	7,71	6,06
11 Gunung Mas	6,29	6,87	6,41	6,96	7,00
12 Barito Timur	6,04	6,73	5,25	5,16	5,50
13 Murung Raya	6,82	6,49	5,85	6,88	5,68
14 Palangkaraya	7,29	7,53	6,96	7,19	6,92
Kalimantan Tengah	6,87	7,37	6,21	7,01	6,36

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2016 (Persen)



BAB 4

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA



3 KATEGORI
DENGAN LAJU
PERTUMBUHAN
TERTINGGI
KABUPATEN
BARITO TIMUR

Laju Pertumbuhan sub Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi



Laju tumbuh Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2016 sebesar 10,12 persen. Laju pertumbuhan

tersebut menduduki peringkat tertinggi dibandingkan 16 kategori lainnya yang ada di Barito Timur tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki masa depan yang tinggi dan cepat berkembang mengingat sektor finansial berperan sangat penting dalam roda perekonomian Barito Timur.

PDRB Kabupaten Barito Timur menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori tertinggi ke-2 dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga berlaku. Namun demikian, besarnya peranan tersebut memiliki kecenderungan menurun tiap tahunnya jika dilihat dari *tren* sepanjang tahun 2012–2016. Peranan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2012 sebesar 20,75 persen, terus mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 18,90 persen di tahun 2016. Turunnya kontribusi kategori ini disebabkan semakin berkembangnya kategori lain dalam menyumbang perekonomian Barito Timur.

Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di tahun 2016 yakni mencapai 83,77 persen. Dimana Golongan Perkebunan Tahunan merupakan penyumbang terbesarnya yaitu sebanyak 58,65 persen, dan Golongan Tanaman Pangan sebesar 8,77 persen. Sementara itu, Subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu menyumbang 5,79 persen, dan Subkategori Perikanan menyumbang 10,44 persen.

Tabel 4.1 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian (Persen), 2012–2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	86,19	85,72	85,64	84,67	83,77
a.	Tanaman Pangan	8,55	8,52	8,45	9,23	8,77
b.	Hortikultura	3,07	3,16	3,28	3,45	3,47
c.	Perkebunan	64,23	63,13	62,68	60,11	58,65
d.	Peternakan	6,64	7,10	7,31	7,79	8,43
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	3,71	3,81	3,91	4,09	4,45
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	5,31	5,39	5,58	5,69	5,79
3	Perikanan	8,50	8,89	8,78	9,64	10,44
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tingginya kontribusi Kategori ini tidak mengherankan, mengingat masih tingginya tumpuan dan harapan penduduk Barito Timur dalam penyerapan tenaga kerja. Karet dan Kelapa Sawit merupakan dua komoditas perkebunan yang paling dominan diusahakan, disamping pada Golongan Tanaman Pangan yaitu komoditas Padi dan Palawija.

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi riil tahun 2016 Kategori Pertanian, Kehutanan, dan perikanan Barito Timur sebesar 3,90 persen. Berdasarkan subkategori pembentuknya maka yang tertinggi adalah Subkategori Perikanan yakni sebesar 7,71 persen, kemudian diikuti oleh Subkategori Pertanian, Peternakan, dan Jasa Pertanian (3,78 persen). Sementara Subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu memiliki laju pertumbuhan yang negatif (-0,46 persen).

Berdasarkan sumber pertumbuhannya terhadap total laju pertumbuhan riil, Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 0,75 persen dari total 5,50 persen laju pertumbuhan Barito Timur. Mengingat tingginya peranan kategori ini, maka dibutuhkan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi maupun kualitas bagi masyarakat yang bergerak di lapangan usaha ini seperti bantuan kemudahan permodalan, pengadaan penyuluhan, maupun pelatihan pertanian.

4.2 Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki peranan yang sangat penting terhadap Perekonomian Barito Timur. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi kategori ini yang menempati urutan pertama terhadap pembentuk perekonomian Barito Timur tahun 2016 yaitu sebesar 38,01 persen.

Subkategori Pertambangan Batu Bara dan Lignit memberikan kontribusi terbesar terhadap Kategori Pertambangan dan Penggalian secara keseluruhan yakni sebesar 93,78 persen. Kemudian diikuti Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi (3,55 persen); serta Pertambangan dan Penggalian Lainnya (2,66 persen).

Tabel 4.2 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	4,02	4,03	4,08	3,76	3,55
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	94,38	94,21	93,90	93,87	93,78
3 Pertambangan Bijih Logam	0	0	0	0	0
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,60	1,76	2,02	2,38	2,66
Pertambangan dan Penggalian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

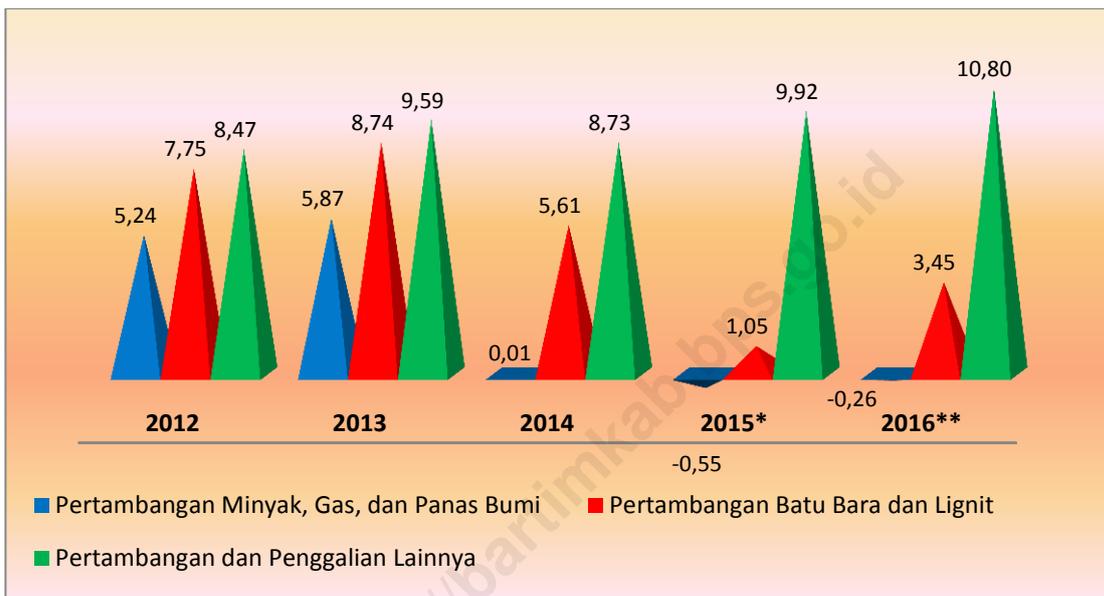
** Angka Sangat Sementara

Secara keseluruhan pada tahun 2016, Kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki laju pertumbuhan sebesar 3,45 persen. Berdasarkan Subkategorinya, maka Subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya memiliki laju pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 10,80 persen. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya produksi penggalian tanah, batu belah, dan pasir yang sejalan dengan meningkatnya kategori industri pengolahan batu bata dan konstruksi yang ada di Barito Timur. Sementara Subkategori Pertambangan Batu Bara dan Lignit tumbuh 3,45 persen; dan Subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi turun menjadi (-0,26) persen.

Pertambangan dan Penggalian merupakan penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi terhadap total pertumbuhan ekonomi Barito Timur dibandingkan kategori-kategori lainnya. Sebesar 1,48 persen pertumbuhan total Barito Timur tahun 2016 disumbangkan oleh kategori ini, dimana Subkategori Pertambangan Batu Bara dan Lignit memberi andil terbesar yaitu 1,40 persen.

Barito Timur memiliki Sumber Daya Alam komoditas pertambangan yang luar biasa. Batu bara merupakan komoditas unggulan yang kaya keberadaanya secara kuantitas maupun kualitas. Melihat kondisi tersebut memang kategori ini sangat strategis untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Namun demikian harus juga dipertimbangkan dari sisi lingkungan dalam jangka panjangnya, mengingat kategori ini sangat bergantung pada alam dan tidak dapat diperbaharukan.

Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

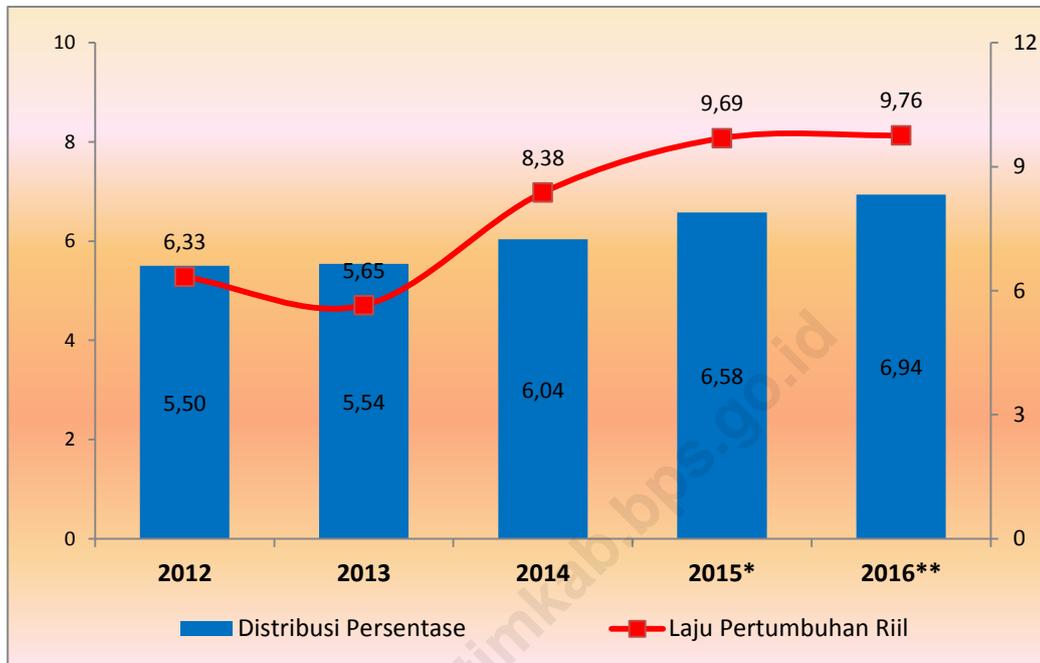
4.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan di Barito Timur hanya mencakup Sublapangan Usaha Industri Pengolahan Non Migas, karena belum adanya Sublapangan Usaha Industri Migas hingga saat ini. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap pembentukan PDRB Barito Timur sepanjang tahun 2012–2016 terus mengalami peningkatan dan berkisar pada angka 5–7 persen. Tahun 2016 Industri Pengolahan berperan 6,94 persen terhadap total PDRB Barito Timur yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 (6,58 persen).

Kinerja Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2016 cukup menggembirakan. Laju pertumbuhan riil kategori ini mencapai 9,76 persen merupakan yang tercepat dibandingkan empat tahun terakhir. Seperti pada tahun 2014 dan 2015 memiliki laju pertumbuhan sebesar 8,38

persen dan 9,69 persen. Sementara berdasarkan sumber pertumbuhan, Kategori ini memberikan andil cukup penting yakni sebesar 0,58 persen terhadap total pertumbuhan Barito Timur tahun 2016.

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sangat kecil terhadap perekonomian Barito Timur. Sepanjang tahun 2012–2016 besarnya kontribusi kategori ini tidak melebihi 0,02 persen. Pada tahun 2016 sebanyak 92,09 persennya disumbangkan oleh Subkategori Ketenagalistrikan, sementara 7,91 persennya oleh Subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es.

Tabel 4.3 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2012–2016

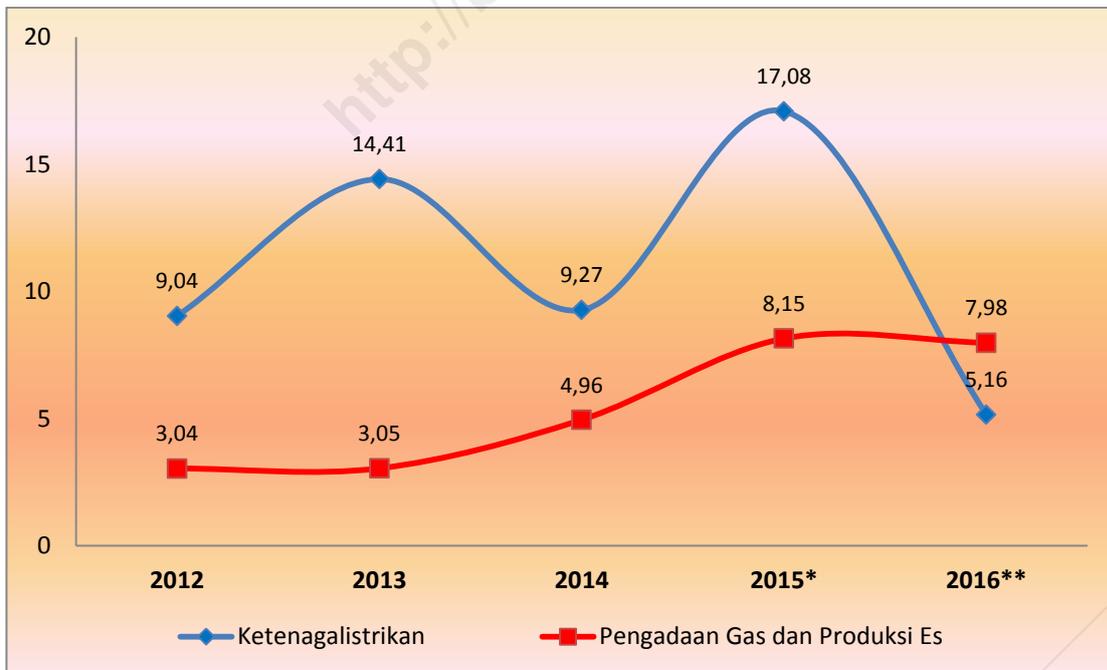
Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Ketenagalistrikan	89,29	89,20	89,70	92,43	92,09
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	10,71	10,80	10,30	7,57	7,91
Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kategori Listrik dan Gas adalah sebesar 5,35 persen. Laju tumbuh ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 16,43 persen. Meskipun melambat, kategori ini tetap tumbuh positif yang disebabkan peningkatan produksi kelistrikan akibat bertambahnya penduduk Barito Timur dan berimbas pada peningkatan penggunaan dan jaringan listrik. Disamping itu pula Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilaksanakan oleh PT. Rimau Electric mulai aktif beroperasi pada pertengahan tahun 2014 di Barito Timur.

Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

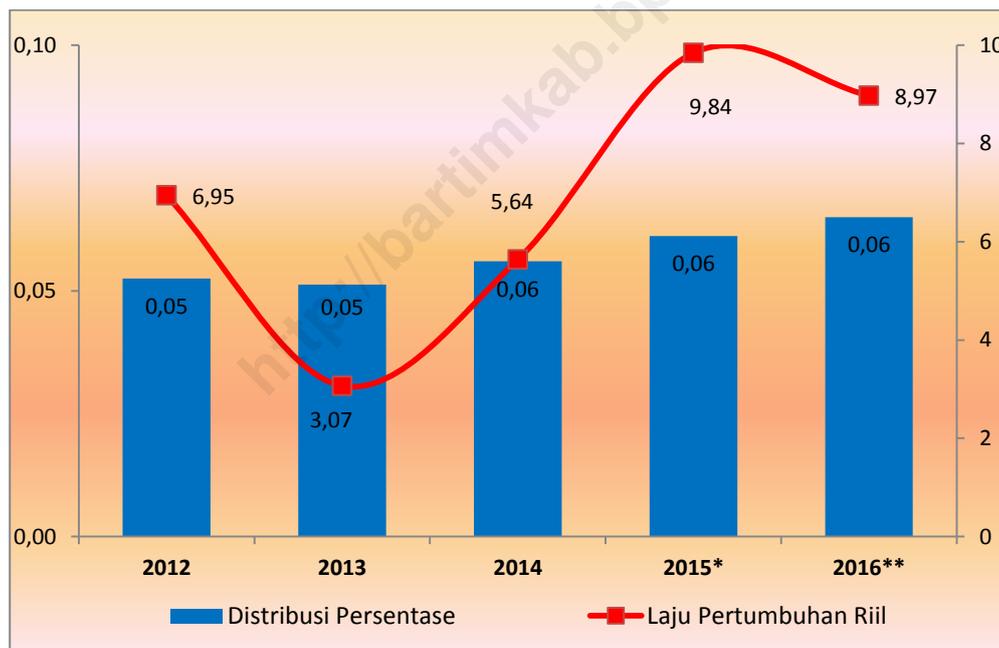
** Angka Sangat Sementara

4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dan lain-lain. Namun, kategori ini tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian Barito Timur selama tahun 2012–2016 relatif stabil di angka 0,05–0,06 persen.

Laju pertumbuhan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Kabupaten Barito Timur selalu bernilai positif yang menunjukkan peningkatan produksi pada kategori ini seiring bertambahnya jumlah penduduk. Besarnya laju pertumbuhan kategori ini di tahun 2016 adalah sebesar 8,97 persen.

Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

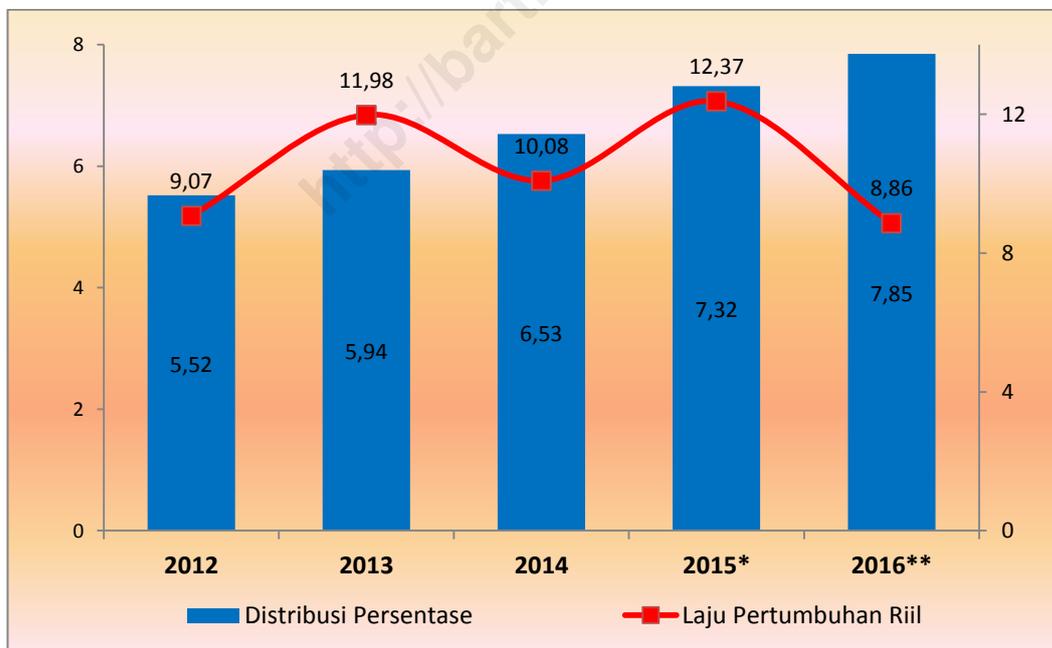
** Angka Sangat Sementara

4.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi memiliki peranan tertinggi ke-3 dalam perekonomian Kabupaten Barito Timur setelah Kategori Pertambangan dan Penggalian serta Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Peranan Kategori Konstruksi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar 7,85 persen, mengalami peningkatan dibandingkan 2015 yang sebesar 7,32 persen. *Tren* peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, laju tumbuh Kategori Konstruksi Barito Timur tahun 2016 sebesar 8,86 persen. Laju tumbuh ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,37 persen. Hal ini disebabkan adanya penghematan anggaran pemerintah di pertengahan tahun 2016 yang berimbas pada turunnya realiasi belanja untuk bangunan. Namun demikian, meskipun mengalami perlambatan, laju tumbuh konstruksi tetap positif dikarenakan pembangunan dari segi non pemerintahan masih mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya bangunan perumahan baik perumahan pribadi, perumahan bersubsidi, dan pertokoan akibat dampak dari penambahan penduduk, serta pembangunan gedung walet yang mulai menjamur di wilayah Barito Timur.

Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Konstruksi Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

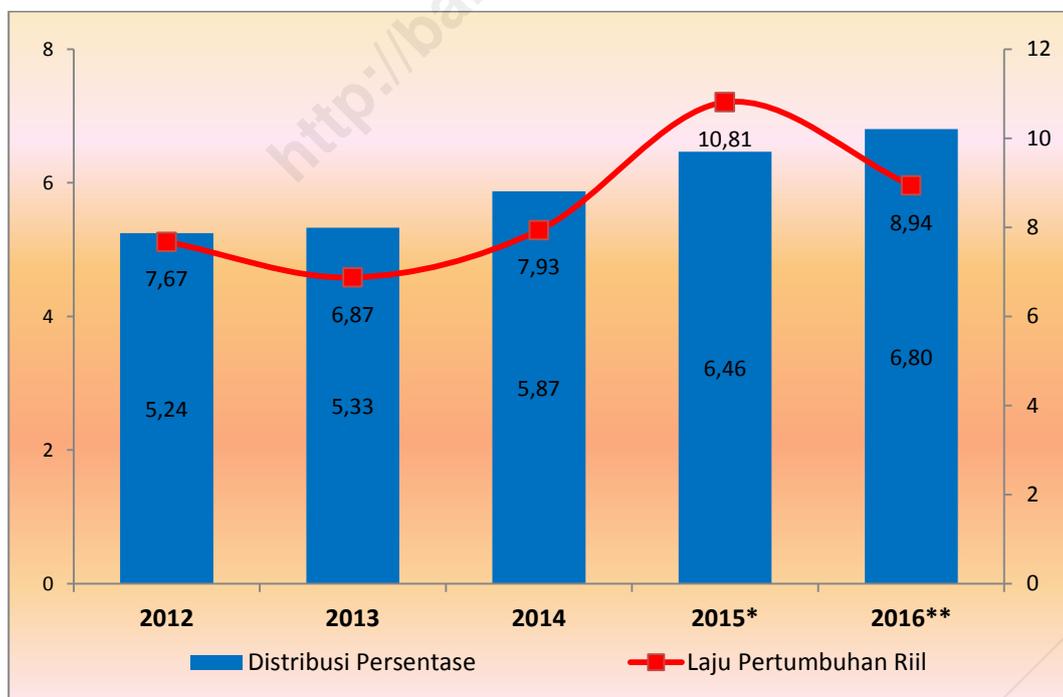
** Angka Sangat Sementara

4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Dalam siklus ekonomi, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Besarnya peranan kategori ini dalam perekonomian Barito Timur sepanjang tahun 2012–2016 berada di atas 5 persen dan mengalami kecenderungan yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Barito Timur atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar 6,80 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya 6,46 persen. Peningkatan aktivitas Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Kategori Industri Pengolahan berkontribusi pada peningkatan nilai tambah kategori ini.

Berdasarkan laju pertumbuhannya, Kategori Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 8,94 persen di tahun 2016. Laju tumbuh ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,81 persen. Perlambatan pada kategori ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kategori pendukungnya, yaitu Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga mengalami perlambatan sehingga memberi dampak terhadap aktivitas perdagangan.

Gambar 4.7 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 Subkategori yaitu: Subkategori Angkutan Rel; Angkutan Darat; Angkutan Laut; Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Angkutan Udara; dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Namun demikian, hanya terdapat 3 subkategori yang tersedia di Kabupaten Barito Timur hingga saat ini yaitu Angkutan Darat; Angkutan Sungai, Danau Laut dan Penyebrangan; serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan.

Selama 5 tahun terakhir peranan kategori ini terhadap perekonomian Barito Timur berada di kisaran 3–4 persen, yaitu 3,42 persen di tahun 2012; 3,62 persen di tahun 2013; 3,96 persen di tahun 2014; 4,28 persen di tahun 2015; dan 4,49 persen di tahun 2016. Sementara itu, berdasarkan subkategori pembentuknya, Angkutan Darat berkontribusi tertinggi terhadap Kategori Transportasi dan Pergudangan Barito Timur tahun 2016 yakni sebesar 66,38 persen; kemudian diikuti Subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (25,43 persen); serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan (8,19 persen).

Tabel 4.4 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Angkutan Rel	0	0	0	0	0
2 Angkutan Darat	61,96	62,88	64,13	65,28	66,38
3 Angkutan Laut	0	0	0	0	0
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	30,54	29,41	28,23	26,74	25,43
5 Angkutan Udara	0	0	0	0	0
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	7,50	7,71	7,64	7,98	8,19
Transportasi dan Pergudangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

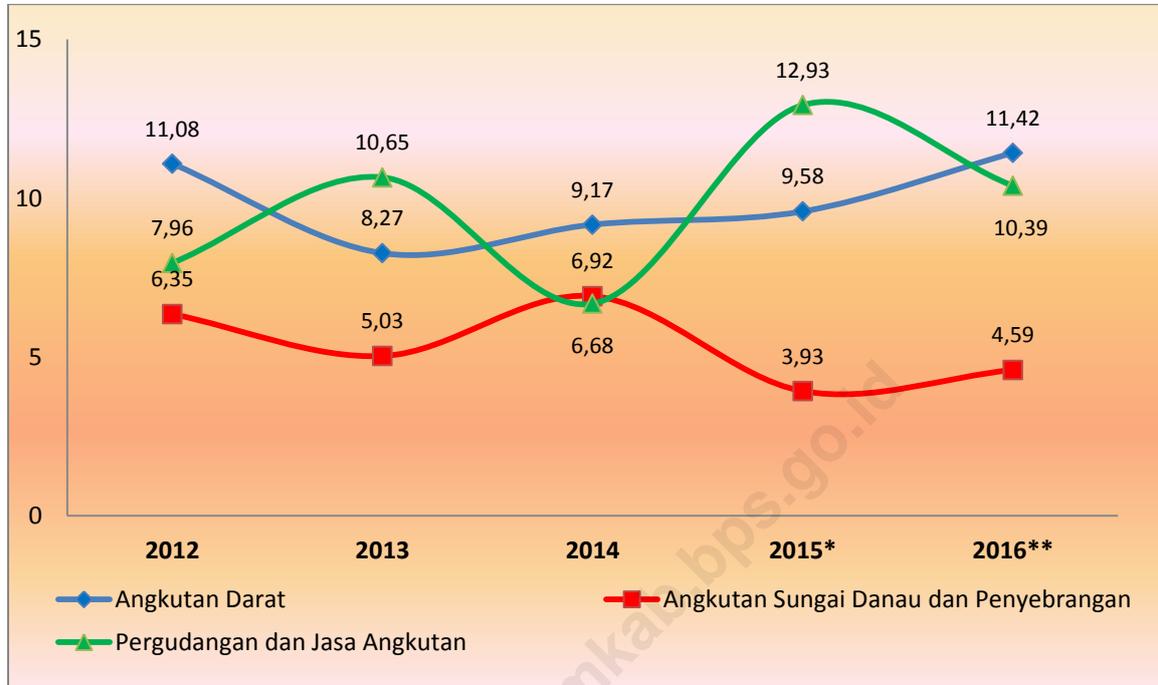
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan Barito Timur tahun 2016 sebesar 9,46 persen. Subkategori Angkutan Darat tumbuh 11,42 persen; Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (4,59 persen); serta Pergudangan dan Jasa Angkutan (10,39 persen). Laju pertumbuhan kategori ini sepanjang lima tahun terakhir selalu bernilai positif. Hal ini

mengindikasikan terjadi peningkatan output pada kategori ini karena semakin tingginya mobilitas dan kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Gambar 4.8 Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum merupakan penunjang terhadap kategori ekonomi lainnya. Seringkali tingkat kemajuan kategori ini digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2016 kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Barito Timur sebesar 1,38 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 1,30 persen. Besarnya kontribusi kategori ini mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Subkategori Penyediaan Makan Minum berkontribusi sebesar 89,54 persen terhadap kategori ini, sementara 10,46 persen sisanya disumbangkan oleh Subkategori Penyediaan Akomodasi.

Gambar 4.9 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016

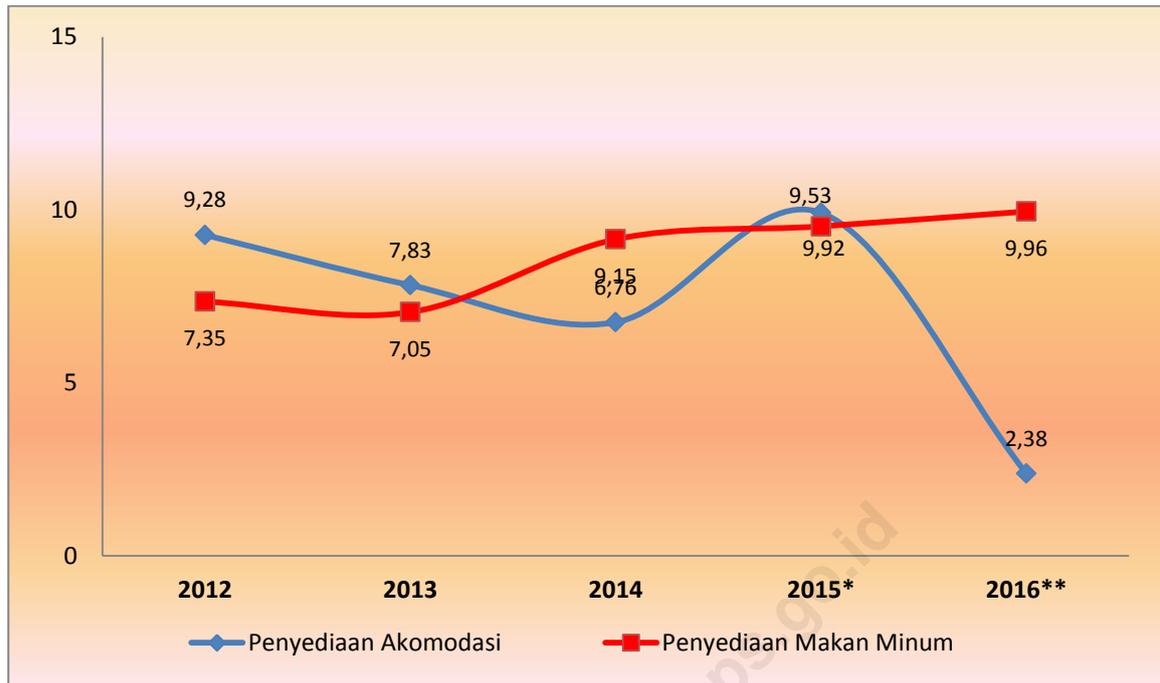


* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara keseluruhan kategori ini mencatat laju pertumbuhan positif sebesar 9,08 persen pada tahun 2016, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9,57 persen. Hal ini disebabkan oleh melambatnya laju tumbuh Subkategori Penyediaan akomodasi menjadi sebesar 2,38 persen dimana tahun 2015 mampu mencapai 9,92 persen. Sementara pada Subkategori Makan Minum justru mengalami percepatan menjadi sebesar 9,96 persen.

Gambar 4.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan makan Minum Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

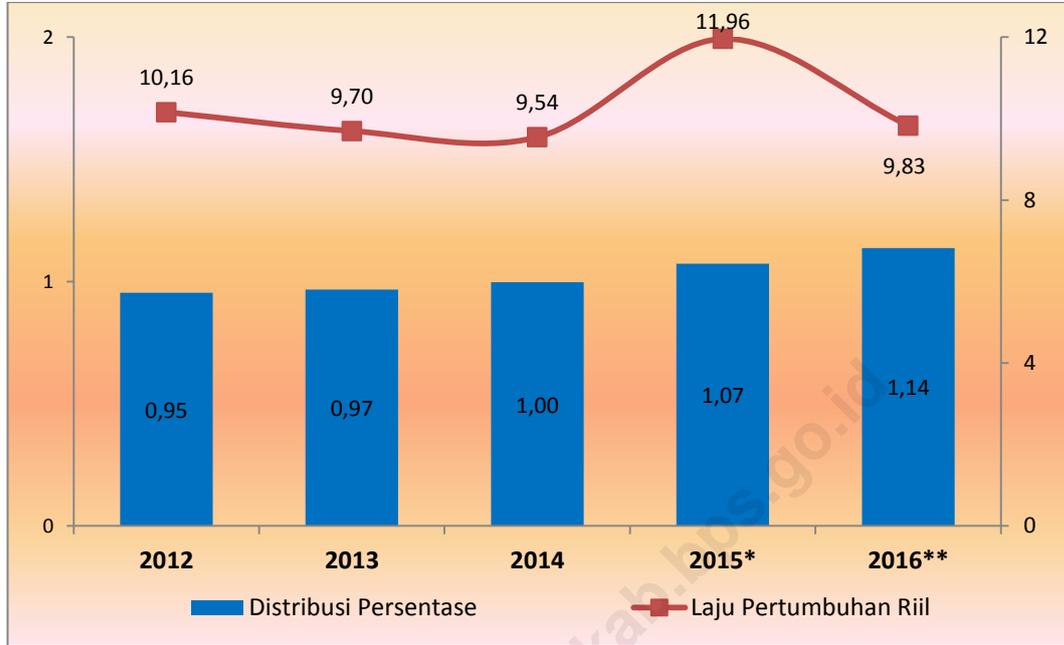
4.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian Barito Timur selama tahun 2012–2016 memiliki kecenderungan meningkat dan berada di kisaran satu persen. Tahun 2016, Kategori Informasi dan Komunikasi berperan sebesar 1,14 persen terhadap perekonomian Barito Timur.

Berdasarkan tren 5 tahun terakhir, besarnya laju pertumbuhan kategori ini selalu bernilai positif dan cukup tinggi yakni dikisaran 9–12 persen. Laju pertumbuhan Kategori Informasi dan komunikasi Barito Timur tahun 2016 sebesar 9,83 persen. Laju tumbuh Kategori ini menduduki urutan ke-3 tertinggi dibandingkan kategori lainnya setelah Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi serta Kategori Jasa Pendidikan. Kecenderungan tingginya laju pertumbuhan kategori ini mengindikasikan peningkatan output yang cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini tidak mengherankan mengingat informasi dan komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang wajib bagi

masyarakat saat ini. Keberadaan Jaringan Seluler sudah mulai tersebar ke desa-desa, bahkan fasilitas internet *Indihome* mulai beroperasi aktif dan meningkat penggunaannya.

Gambar 4.11 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan kategori finansial mengingat kegiatan utama kategori ini adalah mengelola keuangan di Barito Timur. Kategori ini terdiri atas empat Subkategori yaitu: Jasa Perantara Keuangan; Asuransi Dana Pensiun; Jasa Keuangan lainnya; dan Jasa Penunjang Keuangan.

Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap perekonomian Barito Timur sepanjang tahun 2012–2016 mengalami kecenderungan yang meningkat dan berkisar pada angka satu persen. Tahun 2016 besarnya kontribusi kategori ini terhadap PDRB Barito Timur atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1,22 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,18 persen. Subkategori Jasa Perantara Keuangan merupakan kontributor utama terhadap kategori ini yakni sebesar 72,15 persen. Kemudian diikuti oleh Subkategori Asuransi dan Dana Pensiun (20,29 persen); Jasa Keuangan Lainnya (7,46 persen); dan terakhir Jasa Penunjang keuangan (0,09 persen).

Tabel 4.5 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2012–2016

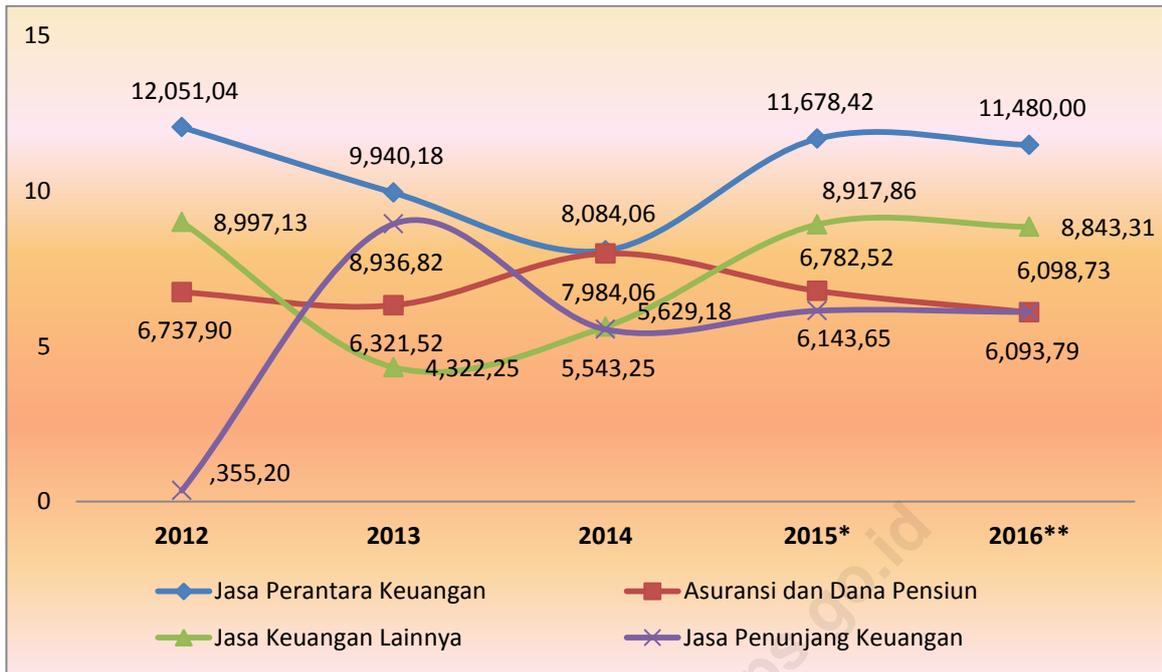
Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Jasa Perantara Keuangan	70,07	70,52	70,54	71,31	72,15
2 Asuransi dan Dana Pensiun	22,21	21,93	21,90	21,11	20,29
3 Jasa Keuangan Lainnya	7,64	7,46	7,48	7,50	7,46
4 Jasa Penunjang Keuangan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Laju tumbuh Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2016 sebesar 10,12 persen. Laju tumbuh tersebut menduduki peringkat tertinggi dibandingkan 16 kategori lainnya yang ada di Barito Timur tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki masa depan yang tinggi dan cepat berkembang mengingat sektor finansial berperan sangat penting dalam roda perekonomian Barito Timur. Sementara itu, berdasarkan subkategori pembentuknya laju tumbuh subkategori tertinggi adalah Jasa Perantara Keuangan yakni sebesar 11,48 persen; kemudian diikuti Jasa Keuangan Lainnya (8,84 persen); Jasa Penunjang Keuangan (6,10 persen); serta Asuransi dan Dana Pensiun (6,09 persen).

Gambar 4.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Timur Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

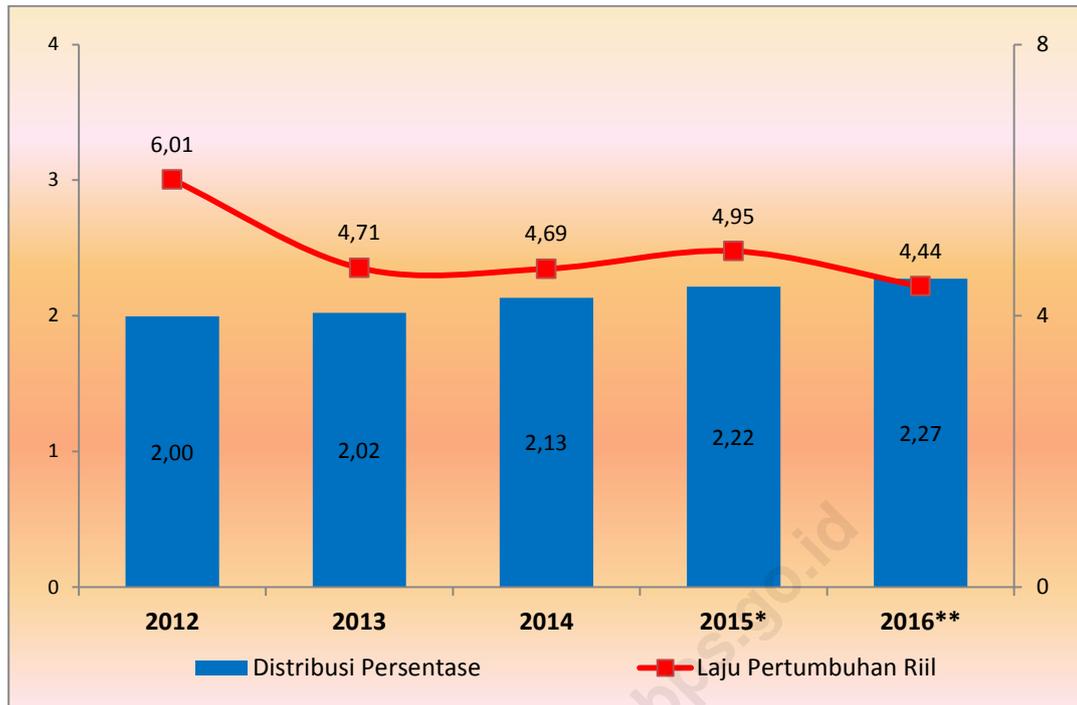
** Angka Sangat Sementara

4.12 Real estate

Kategori *real estate* mengalami peningkatan peranan dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk dan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal di Barito Timur. Pada tahun 2016 kontribusi kategori ini terhadap perekonomian Barito Timur sebesar 2,27 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 dan 2015 yang hanya sebesar 2,13 persen dan 2,22 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini positif dan relatif stabil. Tahun 2016 laju pertumbuhan Kategori *real estate* di Barito Timur sebesar 4,44 persen, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,95 persen.

Gambar 4.13 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori *Real Estate* Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

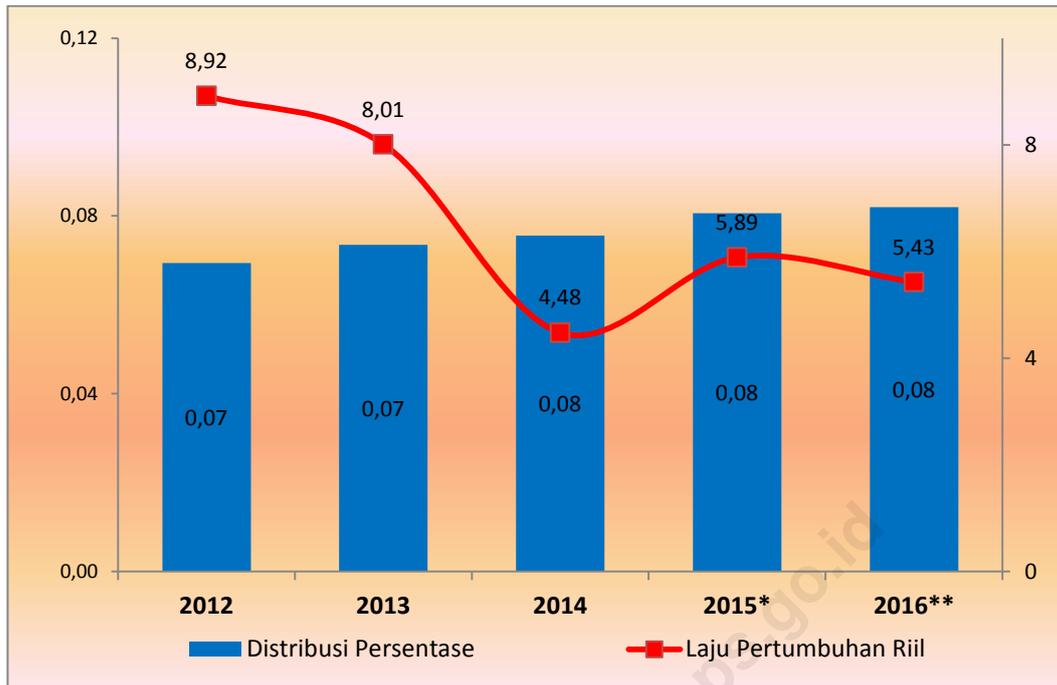
** Angka Sangat Sementara

4.13 Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir besarnya kontribusi kegiatan ekonomi pada Kategori Jasa Perusahaan masih di bawah satu persen. Besarnya peranan kategori ini terhadap perekonomian Barito Timur hanya sebesar 0,07 persen selama 2012–2013, kemudian meningkat dan stabil di angka 0,08 persen di tahun 2014–2016. Hal ini menunjukkan peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Barito Timur.

Laju pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan ini selalu bernilai positif dan cukup fluktuatif sepanjang 5 tahun terakhir. Kecapatan laju tumbuh kategori ini yaitu sebesar 8,92 persen di tahun 2012; melambat menjadi 8,01 persen dan 4,48 persen di tahun 2013 dan 2014; kemudian melaju menjadi 5,89 persen di tahun 2015, dan kembali melambat menjadi 5,43 persen di tahun 2016.

Gambar 4.14 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Jasa Perusahaan Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



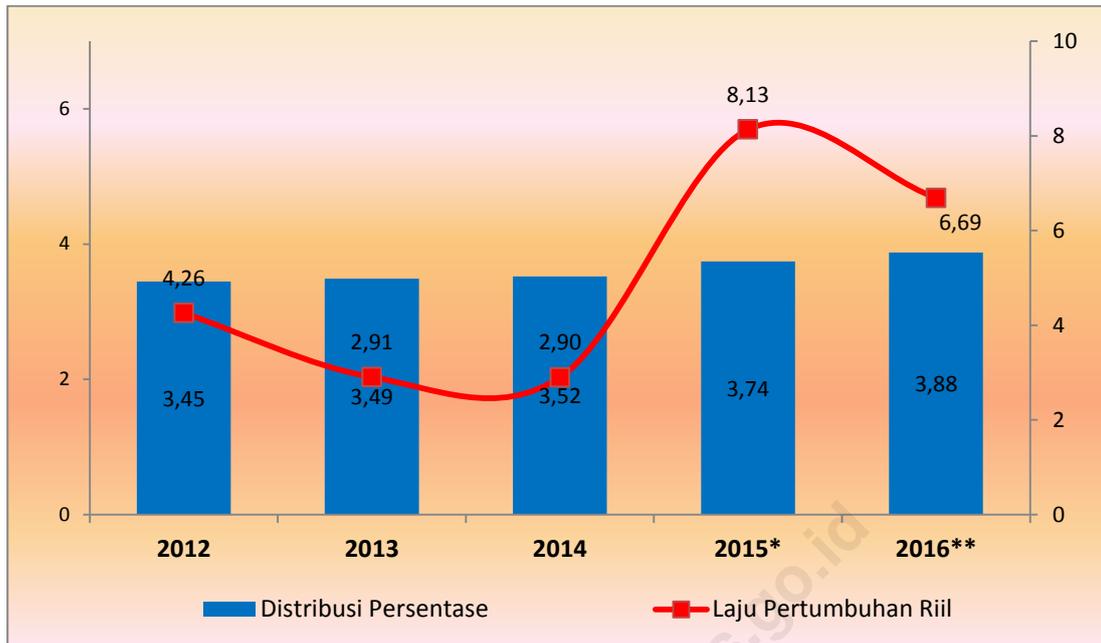
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Pada tahun 2016 kategori ini menyumbang 3,88 persen terhadap total perekonomian Barito Timur, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,74 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan kategori ini selalu positif yaitu dari sebesar 4,26 persen di tahun 2012 dan meningkat menjadi 6,69 persen di tahun 2016.

Gambar 4.15 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Administrasi Pemerintahan Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

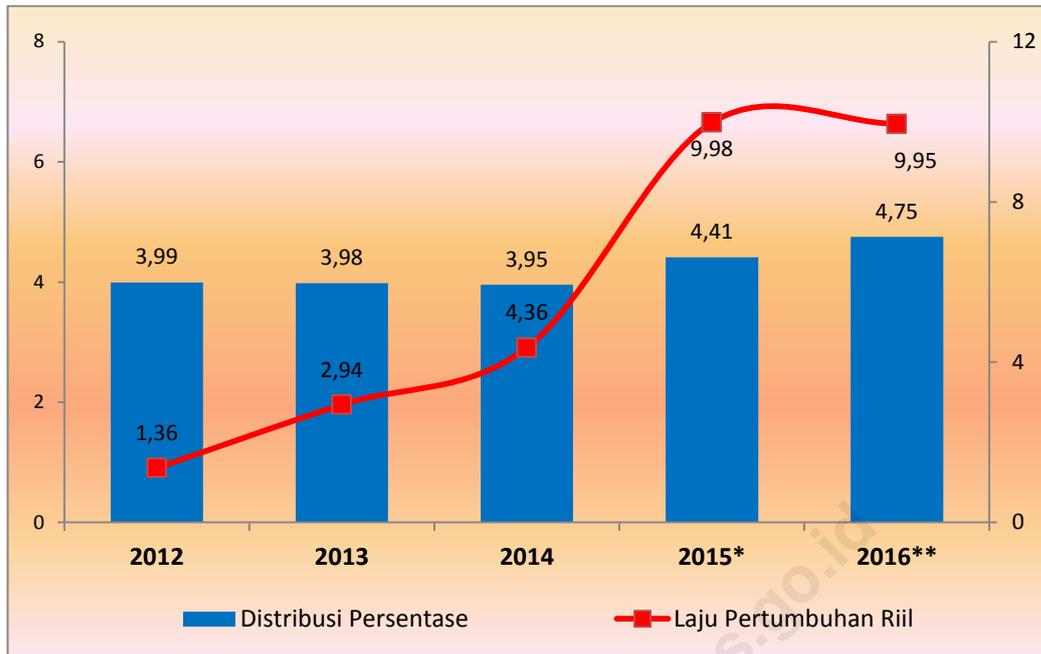
4.15 Jasa Pendidikan

Kategori Jasa Pendidikan mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan.

Peranan Kategori Jasa Pendidikan dalam menyumbang perekonomian Barito Timur selama tahun 2012–2016 menunjukkan *tren* yang meningkat, yakni 3,99 persen di tahun 2012; 3,98 persen di tahun 2013; 3,95 persen di tahun 2014; 4,41 persen di tahun 2015; dan meningkat menjadi 4,75 persen di tahun 2016.

Laju pertumbuhan Kategori Jasa Pendidikan di Barito Timur selalu positif dan memiliki kecenderungan peningkatan yang stabil di kisaran 1–4 persen di tahun 2012–2014. Akan tetapi, laju tumbuh kategori ini dapat meningkat pesat hingga mencapai 9,98 persen di tahun 2015 dan 9,95 persen di tahun 2016. Tingginya laju tumbuh kategori ini menunjukkan peningkatan usaha pembangunan di sektor pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Barito Timur.

Gambar 4.16 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Jasa Pendidikan Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

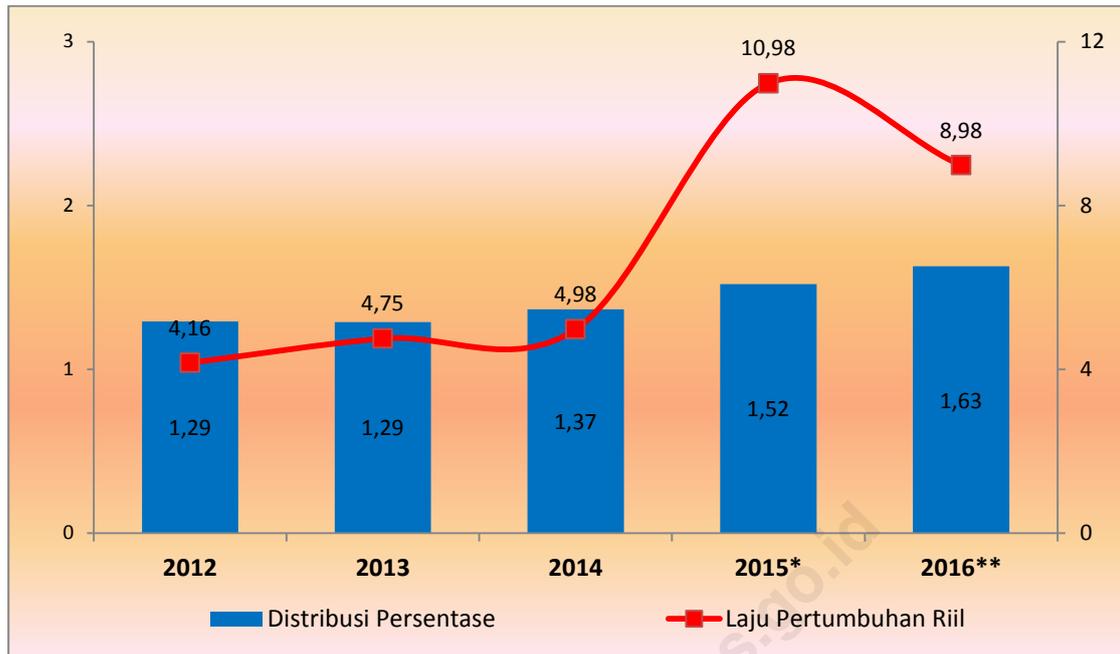
** Angka Sangat Sementara

4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Besarnya peranan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial relatif stabil dan cenderung meningkat di atas satu persen selama periode 5 tahun terakhir. Besarnya kontribusi kategori ini terhadap perekonomian Barito Timur sebesar 1,63 persen di tahun 2016. Sementara itu, berdasarkan laju pertumbuhan riil kategori ini tumbuh sebesar 8,98 persen. Keberadaan peningkatan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, perawat, dan sebagainya serta fasilitas kesehatan memiliki andil terhadap peningkatan laju tumbuh kategori ini.

Gambar 4.17 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Kesehatan dan Kegiatan Sosial Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

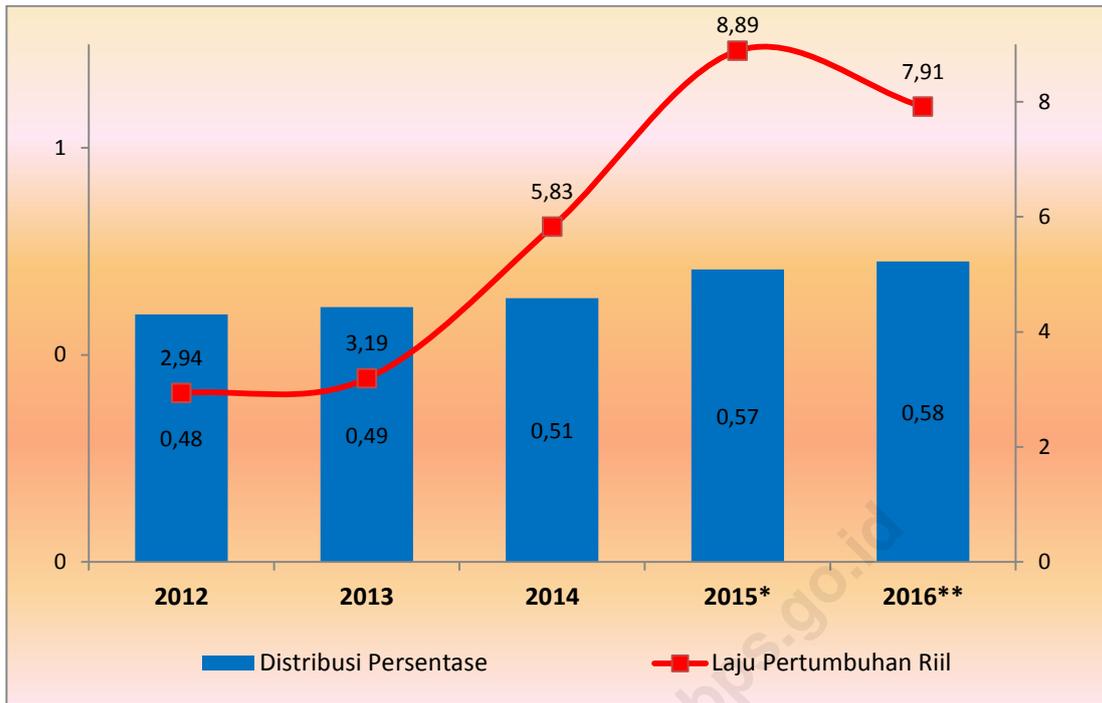
** Angka Sangat Sementara

4.17 Jasa lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; kegiatan jasa lainnya; jasa perorangan yang melayani rumah tangga (kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; serta kegiatan badan internasional dan ekstra internasional lainnya.

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Barito Timur relatif kecil namun cenderung meningkat yaitu berturut-turut sejak 2012–2016 sebesar 0,48 persen; 0,49 persen; 0,51 persen; 0,57 persen; dan 0,58 persen. Sementaraitu, laju pertumbuhannya selalu positif yaitu : 2,94 persen; 3,19 persen; 5,83 persen; 8,89 persen; dan 7,91 persen selama tahun 2012–2016.

Gambar 4.18 Laju Pertumbuhan Riil dan Peranan Kategori Jasa Lainnya Terhadap PDRB Kabupaten Barito Timur (Persen), 2012–2016



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://bartimkab.bpt.go.id>

Lampiran 1.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012–2016

Lapangan usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	847 420,9	887 476,0	941 706,9	1 010 343,3	1 070 733,5
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	730 383,4	760 786,2	806 468,1	855 478,6	896 948,0
	a. Tanaman Pangan	72 413,2	75 582,0	79 605,9	93 278,4	93 866,2
	b. Tanaman Hortikultura	26 003,4	28 048,6	30 862,0	34 826,8	37 146,0
	c. Perkebunan	544 260,2	560 285,7	590 286,0	607 273,9	628 022,3
	d. Peternakan	56 299,7	63 050,9	68 870,6	78 754,7	90 290,4
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	31 406,8	33 819,0	36 843,7	41 344,9	47 623,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	45 018,7	47 811,0	52 520,9	57 450,4	61 962,8
	3 Perikanan	72 018,8	78 878,8	82 717,8	97 414,3	111 822,7
B	Pertambangan dan Penggalian	1 846 104,7	2 001 830,7	2 048 032,3	2 018 139,9	2 153 833,4
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	74 249,6	80 587,2	83 477,7	75 819,0	76 542,8
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	1 742 317,9	1 885 942,2	1 923 087,5	1 894 353,4	2 019 969,2
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	29 537,2	35 301,3	41 467,0	47 967,5	57 321,4
C	Industri Pengolahan	224 824,7	246 333,6	287 900,2	336 591,7	393 056,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	557,5	590,9	669,3	1 022,0	1 145,6
	1 Ketenagalistrikan	497,8	527,1	600,3	944,6	1 054,9
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	59,7	63,8	68,9	77,4	90,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 144,6	2 278,5	2 672,0	3 130,4	3 682,2
F	Konstruksi	225 488,3	263 825,9	311 570,8	374 548,4	444 813,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	214 195,2	236 846,8	280 169,9	330 780,7	385 386,9
H	Transportasi dan Pergudangan	139 769,9	160 902,2	188 739,1	219 199,1	254 428,9
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	86 602,8	101 182,5	121 032,1	143 094,1	168 896,3
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	42 687,8	47 313,4	53 278,3	58 621,2	64 703,8
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	10 479,3	12 406,3	14 428,8	17 483,8	20 828,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42 516,9	48 941,2	56 900,8	66 623,5	78 092,5
	1 Penyediaan Akomodasi	4 959,2	5 674,4	6 301,3	7 410,3	8 165,4
	2 Penyediaan Makan Minum	37 557,7	43 266,8	50 599,5	59 213,1	69 927,1
J	Informasi dan Komunikasi	38 936,3	42 996,0	47 559,2	54 862,0	64 423,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	41 956,8	47 926,1	52 888,5	60 139,5	68 929,3
	1 Jasa Perantara Keuangan	29 399,3	33 797,2	37 305,1	42 883,8	49 733,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9 317,5	10 511,6	11 581,6	12 692,8	13 988,3
	3 Jasa Keuangan Lainnya	3 204,0	3 573,8	3 954,4	4 507,7	5 143,8
	4 Jasa Penunjang Keuangan	36,0	43,5	47,3	55,2	63,8
L	Real Estate	81 536,0	89 835,4	101 777,7	113 400,3	128 810,1
M,N	Jasa Perusahaan	2 836,2	3 265,4	3 607,1	4 125,0	4 645,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	140 748,5	155 122,5	167 943,0	191 489,8	219 622,4
P	Jasa Pendidikan	163 103,8	176 946,1	188 565,2	225 826,6	269 333,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52 758,2	57 278,2	65 185,0	77 800,5	92 337,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	19 523,9	21 876,8	24 314,0	28 920,3	32 883,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4 084 422,5	4 444 272,2	4 770 200,9	5 116 942,9	5 666 159,5

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2.

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012–2016**

Lapangan usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	759 047,5	780 526,1	791 079,2	838 890,6	871 609,1
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	655 392,5	676 879,8	687 316,8	729 033,2	756 559,9
a. Tanaman Pangan	61 927,2	61 577,9	61 449,7	66 346,3	65 957,9
b. Tanaman Hortikultura	22 548,2	22 974,7	23 893,7	25 415,9	25 925,7
c. Perkebunan	494 138,3	512 190,2	518 175,1	547 475,9	569 269,1
d. Peternakan	49 747,1	51 860,0	54 381,8	58 623,8	62 653,3
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	27 031,6	28 277,0	29 416,4	31 171,3	32 753,9
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	41 331,2	40 615,7	40 265,8	40 120,8	39 935,2
3 Perikanan	62 323,8	63 030,7	63 496,7	69 736,6	75 114,0
B Pertambangan dan Penggalian	1 619 542,7	1 759 374,0	1 854 991,5	1 876 104,6	1 940 810,3
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	67 016,7	70 950,6	70 954,6	70 567,1	70 384,8
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	1 526 245,1	1 659 621,2	1 752 719,6	1 771 112,9	1 832 282,0
3 Pertambangan Bijih Logam					
4 Pertambangan dan Penggalian	26 280,9	28 802,2	31 317,3	34 424,6	38 143,6
C Industri Pengolahan	195 874,2	206 935,8	224 269,0	246 003,8	270 010,6
D Pengadaan Listrik dan Gas	620,7	704,2	767,2	893,2	941,0
1 Ketenagalistrikan	568,8	650,8	711,2	832,6	875,6
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	51,8	53,4	56,1	60,6	65,5
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 685,6	1 737,4	1 835,3	2 015,9	2 196,8
F Konstruksi	204 620,7	229 133,2	252 232,3	283 432,0	308 542,3
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	187 595,8	200 490,8	216 397,4	239 784,7	261 216,8
H Transportasi dan Pergudangan	134 711,5	144 788,9	156 842,6	169 719,5	185 781,4
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	84 828,1	91 840,9	100 259,0	109 865,4	122 415,3
3 Angkutan Laut					
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	40 009,1	42 021,6	44 927,5	46 691,1	48 835,7
5 Angkutan Udara					
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang	9 874,3	10 926,4	11 656,2	13 163,0	14 530,4
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36 935,1	39 572,0	43 082,6	47 206,9	51 492,6
1 Penyediaan Akomodasi	4 329,7	4 668,6	4 984,0	5 478,3	5 608,6
2 Penyediaan Makan Minum	32 605,4	34 903,4	38 098,6	41 728,6	45 884,0
J Informasi dan Komunikasi	38 521,5	42 256,5	46 288,6	51 823,9	56 918,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	37 560,8	40 808,9	44 016,3	48 582,3	53 498,1
1 Jasa Perantara Keuangan	25 882,3	28 455,1	30 755,4	34 347,1	38 290,2
2 Asuransi dan Dana Pensiun	8 455,5	8 990,0	9 707,8	10 366,2	10 997,9
3 Jasa Keuangan Lainnya	3 190,3	3 328,2	3 515,5	3 829,0	4 167,7
4 Jasa Penunjang Keuangan	32,7	35,6	37,6	39,9	42,3
L Real Estate	70 396,1	73 709,4	77 168,9	80 992,0	84 584,1
M,N Jasa Perusahaan	2 481,9	2 680,7	2 800,7	2 965,7	3 126,7
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	119 572,8	123 046,9	126 613,4	136 909,8	146 067,3
P Jasa Pendidikan	144 617,5	148 870,2	155 364,2	170 875,6	187 875,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48 255,8	50 547,9	53 063,3	58 890,4	64 178,9
R,S,T,U Jasa lainnya	16 800,1	17 335,9	18 345,9	19 976,2	21 556,9
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3 618 840,3	3 862 518,7	4 065 158,5	4 275 067,0	4 510 406,8

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016

Lapangan usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,75	19,97	19,74	19,75	18,90
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	17,88	17,12	16,91	16,72	15,83
	a. Tanaman Pangan	1,77	1,70	1,67	1,82	1,66
	b. Tanaman Hortikultura	0,64	0,63	0,65	0,68	0,66
	c. Perkebunan	13,33	12,61	12,37	11,87	11,08
	d. Peternakan	1,38	1,42	1,44	1,54	1,59
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,77	0,76	0,77	0,81	0,84
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,10	1,08	1,10	1,12	1,09
	3 Perikanan	1,76	1,77	1,73	1,90	1,97
B	Pertambangan dan Penggalian	45,20	45,04	42,93	39,44	38,01
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	1,82	1,81	1,75	1,48	1,35
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	42,66	42,44	40,31	37,02	35,65
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,72	0,79	0,87	0,94	1,01
C	Industri Pengolahan	5,50	5,54	6,04	6,58	6,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	5,52	5,94	6,53	7,32	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,24	5,33	5,87	6,46	6,80
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42	3,62	3,96	4,28	4,49
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	2,12	2,28	2,54	2,80	2,98
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,05	1,06	1,12	1,15	1,14
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,26	0,28	0,30	0,34	0,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04	1,10	1,19	1,30	1,38
	1 Penyediaan Akomodasi	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14
	2 Penyediaan Makan Minum	0,92	0,97	1,06	1,16	1,23
J	Informasi dan Komunikasi	0,95	0,97	1,00	1,07	1,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	1,08	1,11	1,18	1,22
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,72	0,76	0,78	0,84	0,88
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	2,00	2,02	2,13	2,22	2,27
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,45	3,49	3,52	3,74	3,88
P	Jasa Pendidikan	3,99	3,98	3,95	4,41	4,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,29	1,37	1,52	1,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,48	0,49	0,51	0,57	0,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016

Lapangan usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,97	20,21	19,46	19,62	19,32
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	18,11	17,52	16,91	17,05	16,77
a. Tanaman Pangan	1,71	1,59	1,51	1,55	1,46
b. Tanaman Hortikultura	0,62	0,59	0,59	0,59	0,57
c. Perkebunan	13,65	13,26	12,75	12,81	12,62
d. Peternakan	1,37	1,34	1,34	1,37	1,39
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,75	0,73	0,72	0,73	0,73
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,14	1,05	0,99	0,94	0,89
3 Perikanan	1,72	1,63	1,56	1,63	1,67
B Pertambangan dan Penggalian	44,75	45,55	45,63	43,88	43,03
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	1,85	1,84	1,75	1,65	1,56
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	42,17	42,97	43,12	41,43	40,62
3 Pertambangan Bijih Logam					
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,73	0,75	0,77	0,81	0,85
C Industri Pengolahan	5,41	5,36	5,52	5,75	5,99
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1 Ketenagalistrikan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
F Konstruksi	5,65	5,93	6,20	6,63	6,84
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,18	5,19	5,32	5,61	5,79
H Transportasi dan Pergudangan	3,72	3,75	3,86	3,97	4,12
1 Angkutan Rel					
2 Angkutan Darat	2,34	2,38	2,47	2,57	2,71
3 Angkutan Laut					
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,11	1,09	1,11	1,09	1,08
5 Angkutan Udara					
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	1,02	1,06	1,10	1,14
1 Penyediaan Akomodasi	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
2 Penyediaan Makan Minum	0,90	0,90	0,94	0,98	1,02
J Informasi dan Komunikasi	1,06	1,09	1,14	1,21	1,26
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	1,06	1,08	1,14	1,19
1 Jasa Perantara Keuangan	0,72	0,74	0,76	0,80	0,85
2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
3 Jasa Keuangan Lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Real Estate	1,95	1,91	1,90	1,89	1,88
M,N Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	3,19	3,11	3,20	3,24
P Jasa Pendidikan	4,00	3,85	3,82	4,00	4,17
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,33	1,31	1,31	1,38	1,42
R,S,T,U Jasa lainnya	0,46	0,45	0,45	0,47	0,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016

Lapangan usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,89	2,83	1,35	6,04	3,90
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,21	3,28	1,54	6,07	3,78
	a. Tanaman Pangan	2,95	(0,56)	(0,21)	7,97	(0,59)
	b. Tanaman Hortikultura	2,08	1,89	4,00	6,37	2,01
	c. Perkebunan	1,86	3,65	1,17	5,65	3,98
	d. Peternakan	5,64	4,25	4,86	7,80	6,87
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,03	4,61	4,03	5,97	5,08
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	(1,76)	(1,73)	(0,86)	(0,36)	(0,46)
	3 Perikanan	1,04	1,13	0,74	9,83	7,71
B	Pertambangan dan Penggalian	7,66	8,63	5,43	1,14	3,45
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	5,24	5,87	0,01	(0,55)	(0,26)
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	7,75	8,74	5,61	1,05	3,45
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	8,47	9,59	8,73	9,92	10,80
C	Industri Pengolahan	6,33	5,65	8,38	9,69	9,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,51	13,46	8,94	16,43	5,35
	1 Ketenagalistrikan	9,04	14,41	9,27	17,08	5,16
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	3,04	3,05	4,96	8,15	7,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,95	3,07	5,64	9,84	8,97
F	Konstruksi	9,07	11,98	10,08	12,37	8,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,67	6,87	7,93	10,81	8,94
H	Transportasi dan Pergudangan	9,41	7,48	8,33	8,21	9,46
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	11,08	8,27	9,17	9,58	11,42
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	6,35	5,03	6,92	3,93	4,59
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	7,96	10,65	6,68	12,93	10,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,58	7,14	8,87	9,57	9,08
	1 Penyediaan Akomodasi	9,28	7,83	6,76	9,92	2,38
	2 Penyediaan Makan Minum	7,35	7,05	9,15	9,53	9,96
J	Informasi dan Komunikasi	10,16	9,70	9,54	11,96	9,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,54	8,65	7,86	10,37	10,12
	1 Jasa Perantara Keuangan	12,05	9,94	8,08	11,68	11,48
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	6,74	6,32	7,98	6,78	6,09
	3 Jasa Keuangan Lainnya	9,00	4,32	5,63	8,92	8,84
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,36	8,94	5,54	6,14	6,10
L	Real Estate	6,01	4,71	4,69	4,95	4,44
M,N	Jasa Perusahaan	8,92	8,01	4,48	5,89	5,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,26	2,91	2,90	8,13	6,69
P	Jasa Pendidikan	1,36	2,94	4,36	9,98	9,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,16	4,75	4,98	10,98	8,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,94	3,19	5,83	8,89	7,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,04	6,73	5,25	5,16	5,50

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6.

Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016

Lapangan usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	117,33	122,87	130,38	139,89	148,25
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	117,87	122,77	130,15	138,06	144,75
	a. Tanaman Pangan	122,27	127,62	134,41	157,50	158,49
	b. Tanaman Hortikultura	121,84	131,43	144,61	163,19	174,05
	c. Perkebunan	116,35	119,78	126,19	129,82	134,26
	d. Peternakan	122,11	136,76	149,38	170,82	195,84
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	124,58	134,15	146,15	164,00	188,90
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	107,97	114,67	125,96	137,78	148,61
	3 Perikanan	118,25	129,51	135,82	159,95	183,60
B	Pertambangan dan Penggalian	134,14	145,46	148,82	146,64	156,50
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	118,04	128,11	132,71	120,53	121,69
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	134,99	146,11	148,99	146,76	156,50
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	130,80	156,33	183,63	212,42	253,84
C	Industri Pengolahan	128,51	140,80	164,56	192,39	224,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	114,64	121,51	137,62	210,16	235,57
	1 Ketenagalistrikan	113,77	120,46	137,20	215,88	241,09
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	122,50	130,93	141,45	158,81	186,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	137,45	146,03	171,25	200,63	235,99
F	Konstruksi	128,69	150,57	177,82	213,76	253,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	132,17	146,15	172,88	204,11	237,80
H	Transportasi dan Pergudangan	123,40	142,06	166,64	193,53	224,63
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	124,97	146,01	174,65	206,49	243,72
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	121,45	134,61	151,58	166,78	184,09
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	118,86	140,72	163,66	198,31	236,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	134,97	155,36	180,63	211,50	247,90
	1 Penyediaan Akomodasi	129,08	147,70	164,01	192,88	212,54
	2 Penyediaan Makan Minum	135,79	156,43	182,94	214,08	252,82
J	Informasi dan Komunikasi	120,37	132,92	147,02	169,60	199,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	166,88	190,62	210,36	239,20	274,16
	1 Jasa Perantara Keuangan	199,07	228,85	252,60	290,38	336,76
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	122,18	137,84	151,87	166,44	183,43
	3 Jasa Keuangan Lainnya	117,95	131,57	145,58	165,95	189,36
	4 Jasa Penunjang Keuangan	115,70	139,92	152,24	177,44	205,10
L	Real Estate	130,75	144,06	163,21	181,85	206,56
M,N	Jasa Perusahaan	131,65	151,57	167,43	191,47	215,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	128,22	141,32	153,00	174,45	200,08
P	Jasa Pendidikan	115,70	125,52	133,76	160,19	191,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,53	130,86	148,92	177,75	210,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	123,38	138,25	153,65	182,76	207,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		128,04	139,32	149,54	160,41	177,63

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7.

Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016

Lapangan usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	105,09	108,07	109,53	116,15	120,68
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	105,77	109,23	110,92	117,65	122,09
	a. Tanaman Pangan	104,56	103,97	103,75	112,02	111,37
	b. Tanaman Hortikultura	105,65	107,65	111,96	119,09	121,48
	c. Perkebunan	105,64	109,49	110,77	117,04	121,70
	d. Peternakan	107,90	112,48	117,95	127,15	135,89
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	107,22	112,16	116,68	123,65	129,92
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	99,13	97,41	96,57	96,22	95,78
	3 Perikanan	102,33	103,49	104,26	114,50	123,33
B	Pertambangan dan Penggalian	117,68	127,84	134,79	136,32	141,02
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	106,54	112,79	112,80	112,19	111,90
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	118,25	128,58	135,79	137,22	141,96
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	116,38	127,55	138,69	152,45	168,92
C	Industri Pengolahan	111,96	118,28	128,19	140,61	154,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	127,63	144,82	157,77	183,68	193,51
	1 Ketenagalistrikan	130,00	148,74	162,53	190,28	200,10
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	106,36	109,60	115,03	124,41	134,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	108,03	111,35	117,62	129,20	140,79
F	Konstruksi	116,78	130,77	143,95	161,76	176,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	115,76	123,71	133,53	147,96	161,18
H	Transportasi dan Pergudangan	118,94	127,83	138,47	149,84	164,02
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	122,41	132,53	144,67	158,54	176,65
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	113,83	119,55	127,82	132,84	138,94
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	112,00	123,93	132,21	149,30	164,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,25	125,62	136,77	149,86	163,46
	1 Penyediaan Akomodasi	112,70	121,52	129,73	142,59	145,99
	2 Penyediaan Makan Minum	117,88	126,19	137,74	150,87	165,89
J	Informasi dan Komunikasi	119,09	130,63	143,10	160,21	175,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149,40	162,32	175,07	193,23	212,79
	1 Jasa Perantara Keuangan	175,26	192,68	208,25	232,57	259,27
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	110,88	117,89	127,30	135,93	144,22
	3 Jasa Keuangan Lainnya	117,45	122,52	129,42	140,96	153,43
	4 Jasa Penunjang Keuangan	105,15	114,55	120,90	128,33	136,16
L	Real Estate	112,89	118,20	123,75	129,88	135,64
M,N	Jasa Perusahaan	115,20	124,43	130,00	137,66	145,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	108,93	112,10	115,35	124,73	133,07
P	Jasa Pendidikan	102,59	105,60	110,21	121,21	133,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,25	115,48	121,23	134,54	146,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	106,17	109,55	115,93	126,24	136,22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		113,45	121,09	127,44	134,02	141,40

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur
Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016

Lapangan usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111,64	113,70	119,04	120,44	122,85
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	111,44	112,40	117,34	117,34	118,56
a. Tanaman Pangan	116,93	122,74	129,55	140,59	142,31
b. Tanaman Hortikultura	115,32	122,08	129,16	137,03	143,28
c. Perkebunan	110,14	109,39	113,92	110,92	110,32
d. Peternakan	113,17	121,58	126,64	134,34	144,11
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	116,19	119,60	125,25	132,64	145,40
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	108,92	117,72	130,44	143,19	155,16
3 Perikanan	115,56	125,14	130,27	139,69	148,87
B Pertambangan dan Penggalian	113,99	113,78	110,41	107,57	110,98
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	110,79	113,58	117,65	107,44	108,75
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	114,16	113,64	109,72	106,96	110,24
3 Pertambangan Biji Logam					
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	112,39	122,56	132,41	139,34	150,28
C Industri Pengolahan	114,78	119,04	128,37	136,82	145,57
D Pengadaan Listrik dan Gas	89,82	83,90	87,23	114,42	121,74
1 Ketenagalistrikan	87,51	80,99	84,42	113,45	120,48
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	115,18	119,46	122,97	127,65	138,50
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	127,23	131,15	145,59	155,28	167,61
F Konstruksi	110,20	115,14	123,53	132,15	144,17
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	114,18	118,13	129,47	137,95	147,54
H Transportasi dan Pergudangan	103,75	111,13	120,34	129,15	136,95
1 Angkutan Rel					
2 Angkutan Darat	102,09	110,17	120,72	130,24	137,97
3 Angkutan Laut					
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	106,70	112,59	118,59	125,55	132,49
5 Angkutan Udara					
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	106,13	113,54	123,79	132,82	143,35
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115,11	123,68	132,07	141,13	151,66
1 Penyediaan Akomodasi	114,54	121,55	126,43	135,27	145,59
2 Penyediaan Makan Minum	115,19	123,96	132,81	141,90	152,40
J Informasi dan Komunikasi	101,08	101,75	102,74	105,86	113,19
K Jasa Keuangan dan Asuransi	111,70	117,44	120,16	123,79	128,84
1 Jasa Perantara Keuangan	113,59	118,77	121,30	124,85	129,89
2 Asuransi dan Dana Pensiun	110,19	116,93	119,30	122,44	127,19
3 Jasa Keuangan Lainnya	100,43	107,38	112,48	117,72	123,42
4 Jasa Penunjang Keuangan	110,02	122,15	125,92	138,27	150,64
L Real Estate	115,82	121,88	131,89	140,01	152,29
M,N Jasa Perusahaan	114,27	121,81	128,79	139,09	148,58
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	117,71	126,07	132,64	139,87	150,36
P Jasa Pendidikan	112,78	118,86	121,37	132,16	143,36
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,33	113,31	122,84	132,11	143,88
R,S,T,U Jasa lainnya	116,21	126,19	132,53	144,77	152,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	112,87	115,06	117,34	119,69	125,62

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 9.

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016

Lapangan usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,85	1,84	4,70	1,17	2,00
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,08	0,86	4,39	0,01	1,03
a. Tanaman Pangan	7,18	4,97	5,54	8,53	1,22
b. Tanaman Hortikultura	7,57	5,86	5,80	6,09	4,56
c. Perkebunan	(0,77)	(0,68)	4,14	(2,63)	(0,54)
d. Peternakan	6,20	7,43	4,17	6,08	7,27
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	7,23	2,94	4,72	5,90	9,62
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	6,28	8,07	10,81	9,78	8,36
3 Perikanan	7,09	8,30	4,10	7,23	6,57
B Pertambangan dan Penggalian	(0,50)	(0,18)	(2,97)	(2,57)	3,17
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	5,55	2,52	3,58	(8,68)	1,22
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	(0,88)	(0,46)	(3,45)	(2,52)	3,07
3 Pertambangan Bijih Logam					
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	8,35	9,05	8,03	5,24	7,85
C Industri Pengolahan	6,92	3,71	7,84	6,58	6,39
D Pengadaan Listrik dan Gas	(4,60)	(6,59)	3,97	31,16	6,40
1 Ketenagalistrikan	(5,96)	(7,46)	4,24	34,40	6,19
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	9,12	3,72	2,93	3,81	8,50
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,18	3,08	11,01	6,66	7,94
F Konstruksi	6,16	4,49	7,28	6,98	9,09
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,52	3,46	9,60	6,55	6,95
H Transportasi dan Pergudangan	1,93	7,11	8,29	7,33	6,04
1 Angkutan Rel					
2 Angkutan Darat	0,80	7,91	9,57	7,89	5,93
3 Angkutan Laut					
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	4,08	5,53	5,32	5,87	5,53
5 Angkutan Udara					
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	2,97	6,99	9,02	7,30	7,92
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	7,44	6,79	6,86	7,46
1 Penyediaan Akomodasi	8,45	6,12	4,02	6,99	7,63
2 Penyediaan Makan Minum	6,83	7,62	7,14	6,84	7,40
J Informasi dan Komunikasi	(0,76)	0,67	0,98	3,03	6,92
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,60	5,14	2,31	3,02	4,08
1 Jasa Perantara Keuangan	6,31	4,57	2,12	2,93	4,03
2 Asuransi dan Dana Pensiun	5,20	6,11	2,03	2,63	3,88
3 Jasa Keuangan Lainnya	0,25	6,92	4,75	4,66	4,84
4 Jasa Penunjang Keuangan	7,13	11,02	3,09	9,81	8,94
L Real Estate	5,82	5,23	8,21	6,16	8,77
M,N Jasa Perusahaan	6,77	6,60	5,73	8,00	6,82
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,82	7,10	5,22	5,45	7,50
P Jasa Pendidikan	4,47	5,39	2,11	8,89	8,47
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,91	3,64	8,41	7,54	8,90
R,S,T,U Jasa lainnya	7,55	8,59	5,02	9,24	5,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,92	1,95	1,98	2,00	4,96

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jl. Manunggal No.13 Tamiang Layang 73611
Barito Timur-Kalimantan Tengah, Telp /Fax : (0526) 2091436
website : bartimkab.bps.go.id; email : bps6212@bps.go.id

